



**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**



14069



Corsec@banksulteng.co.id

www.banksulteng.co.id

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2022
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2022

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan, yang terdiri dari:	
- Laporan Posisi Keuangan	1 - 2
- Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3
- Laporan Perubahan Ekuitas	4
- Laporan Arus Kas	5
- Catatan atas Laporan Keuangan	6 - 75

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA 31 DESEMBER 2022
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Judy Koagow
Alamat Kantor : JL. Sultan Hasanuddin No. 20 Palu
Jabatan : Direktur Kepatuhan

Nama : Ramiyatie
Alamat Kantor : JL. Sultan Hasanuddin No. 20 Palu
Jabatan : Direktur Operasional

Untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;
2. Laporan keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun lalu yang berakhir pada tanggal tersebut telah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Semua informasi dalam laporan keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah telah dimuat secara lengkap dan benar.
4. Laporan Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah tidak mengandung informasi atau material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
5. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah sesuai perundang-undangan yang berlaku.
6. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal, pencegahan dan penanggulangan kecurangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan bagi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Palu, 20 Februari 2023

PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah



Judy Koagow
Direktur Kepatuhan

Hj. Ramiyatie
Direktur Operasional

Alamat :

Jl. Sultan Hasanudin No. 20 Palu
Telp. (0451) 424537, 429509, 421780 Fax.(0451) 452836
Website : www.banksulteng.co.id
Sulawesi Tengah - 94112

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
00012/2.1034/AU.1/07/1162-2/1/II/2023

Kepada Yth
Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Hormat Kami,
Kantor Akuntan Publik
Annas Cahyadi



Annas Cahyadi, M.Sc, Ak, CA, CPA
NRAP: AP.1162

20 Februari 2023



PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2022	2021
ASET			
Kas	2d,3	152.060.558.750	223.579.335.750
Giro pada Bank Indonesia	2e,4	911.669.842.388	349.461.255.783
Giro pada Bank Lain	2e,5	363.809.563.426	5.119.882.571
Setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai tahun 2022 sebesar Nihil dan tahun 2021 sebesar Nihil			
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	2f,6	895.396.422.452	3.146.221.769.575
Setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai tahun 2022 sebesar Nihil dan tahun 2021 sebesar Nihil			
Efek-efek	2g,7	3.249.088.471.778	1.543.549.706.471
setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai tahun 2022 sebesar Rp45.872.130 dan tahun 2021 sebesar Rp143.713.372.			
Kredit yang Diberikan	2h,8		
Pihak Berelasi		21.925.681.829	26.011.000.000
Pihak Ketiga		6.245.525.677.993	5.599.578.709.825
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	2c,8	(108.374.916.164)	(96.229.982.598)
Jumlah Kredit yang Diberikan - Bersih		6.159.076.443.658	5.529.359.727.226
Aset Tetap	2i,9	114.654.069.415	107.610.134.585
setelah dikurangi akumulasi penyusutan tahun 2022 sebesar Rp85.920.518.139 dan tahun 2021 sebesar Rp75.673.976.765.			
Aset Tak Berwujud	2j,10	2.914.743.446	3.061.775.100
setelah dikurangi akumulasi amortisasi tahun 2022 sebesar Rp2.576.738.554 dan tahun 2021 sebesar Rp2.078.871.900.			
Aset Pajak Tangguhan	16	5.637.063.069	10.944.591.540
Beban Dibayar Di Muka dan Aset Lain-lain	11	109.603.534.437	82.279.034.444
TOTAL ASET		11.963.910.712.820	11.001.187.213.045

12 Palu, 20 Februari 2023


Bank Sulteng
 Direktur Kepatuhan


 Hj. Ramiyatie
 Direktur Operasional


Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN
 PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2022	2021
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas			
Liabilitas Segera	12	1.409.894.159.108	780.970.921.529
Simpanan Nasabah	2m,13		
Pihak Berelasi		579.453.783.112	379.817.412.325
Pihak Ketiga		7.565.620.634.009	7.599.715.364.623
Simpanan dari Bank Lain	2n,14	850.000.000.000	825.000.000.000
Pinjaman yang Diterima	2m,15	75.013.098.643	67.998.512.380
Utang Pajak	2q,16	693.978.560	6.389.207.440
Liabilitas Imbalan Kerja	2r,30	45.035.719.345	46.443.836.764
Beban yang Masih Harus Dibayar dan Liabilitas Lain-lain	17	18.443.277.667	42.261.537.509
Jumlah Liabilitas		<u>10.544.154.650.443</u>	<u>9.748.596.792.571</u>
Ekuitas			
Modal Saham	18b	426.990.000.000	426.990.000.000
Nilai nominal Rp100.000 per saham, modal dasar 17.000.000 saham, dan modal ditetapkan dan disetor penuh tahun 2022 sebanyak 4.269.900 Lembar saham dan tahun 2021 sebanyak 4.269.900 lembar saham.			
Agio Saham	18d	164.914.943.524	164.914.943.524
Dana Setoran Modal	18c	63.348.433.033	33.532.137.607
Komponen Ekuitas Lainnya			
Pendapatan Komprehensif Lainnya	19		
Keuntungan/(Kerugian) Nilai Wajar Surat Berharga			
Keuntungan/(Kerugian) Aktuarial Program Manfaat Pasti Setelah Dikurangi/Ditambah Pajak-pajak Terkait		21.440.410.837	12.769.613.920
Saldo Laba			
Telah Ditentukan Penggunaannya		496.676.863.165	409.374.233.127
Belum Ditentukan Penggunaannya		246.385.411.817	205.009.492.297
Jumlah Ekuitas		<u>1.419.756.062.376</u>	<u>1.252.590.420.475</u>
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>11.963.910.712.820</u>	<u>11.001.187.213.045</u>

Palu, 20 Februari 2023


 Direktur Kepala
 Ditektur Kepala


 Hj. Ramiyatie
 Direktur Operasional

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan


PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2022	2021
Pendapatan dan Beban Operasional			
Pendapatan Bunga	2p,21	875.668.812.563	744.274.593.028
Beban Bunga	2p,22	(259.522.375.375)	(214.459.344.705)
Pendapatan Bunga - Bersih		616.146.437.188	529.815.248.322
Pendapatan Operasional Lainnya	23	73.255.890.526	78.881.955.588
Beban Operasional			
Penyisihan/(Pemulihan) CKPN	24	16.483.383.072	899.098.116
Administrasi dan Umum	25	134.823.654.428	112.959.301.450
Tenaga Kerja	26	192.142.559.843	194.039.549.773
Lainnya	27	27.892.325.453	29.310.584.500
Jumlah Beban Operasional		371.341.922.797	337.208.533.840
Laba Operasional		318.060.404.917	271.488.670.071
Pendapatan dan Beban Non Operasional	28		
Pendapatan Non Operasional		4.661.098.034	3.802.039.385
Beban Non Operasional		(2.041.704.374)	(1.801.217.386)
Jumlah Pendapatan dan Beban Non Operasional		2.619.393.660	2.000.821.998
Laba Bersih Sebelum Pajak		320.679.798.577	273.489.492.069
Beban Pajak Penghasilan	2q,16		
Beban Pajak Kini		67.423.271.960	59.958.551.400
(Manfaat)/Beban Pajak Tangguhan		6.871.114.800	8.521.448.372
Jumlah Beban Pajak Penghasilan		74.294.386.760	68.479.999.772
Laba Tahun Berjalan		246.385.411.817	205.009.492.297
Pendapatan Komprehensif Lain			
Pos - pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			
Keuntungan/(Kerugian) Nilai Wajar Surat Berharga		-	-
Keuntungan/(Kerugian) Akturial Program Manfaat Pasti		7.107.210.588	2.746.347.886
Pajak Penghasilan terkait dengan komponen OCI		1.563.586.329	604.196.535
(Kerugian)/Pendapatan Komprehensif Lain Periode Berjalan		8.670.796.917	3.350.544.421
Total Laba Komprehensif		255.056.208.734	208.360.036.718

Palu, 20 Februari 2023


 Direksi

 Judy Kbagdw
 Direktur Kepatuhan


 Hj. Ramiyatie
 Direktur Operasional

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Modal Disetor	Dana		Keuntungan/ (Kerugian) Nilai Wajar Surat Berharga	Keuntungan/ (Kerugian) Aktuarial Program Manfaat Pasti	Telah Ditentukan Penggunaannya		Belum Ditentukan Penggunaannya	Jumlah
		Setoran Modal	Agio			Cadangan Tujuan	Cadangan Umum		
Saldo Per 31 Desember 2020	426.990.000.000	9.364.750.786	164.914.943.524	-	9.419.069.499	7.248.644.242	309.250.421.210	184.410.189.063	1.111.598.018.324
Tambahan Setoran Modal selama tahun 2021		24.167.386.821							24.167.386.821
Pembagian Laba Tahun 2021									-
Dividen								(92.205.094.531)	(92.205.094.531)
Cadangan Umum							92.205.094.532	(92.205.094.532)	-
Pengembalian CSR ke Cadangan Tujuan						670.073.143			670.073.143
Laba Bersih Setelah Pajak								205.009.492.297	205.009.492.297
Pendapatan (Beban) Komprehensif lain tahun berjalan					3.350.544.421				3.350.544.421
Saldo Per 31 Desember 2021	426.990.000.000	33.532.137.607	164.914.943.524	-	12.769.613.920	7.918.717.385	401.455.515.742	205.009.492.297	1.252.590.420.475
Tambahan Setoran Modal selama tahun 2022		29.816.295.426							29.816.295.426
Pembagian Laba Tahun 2022									-
Dividen								(102.504.746.149)	(102.504.746.149)
Cadangan Umum							102.504.746.148	(102.504.746.148)	-
CSR						(202.116.110)	(15.000.000.000)		(15.202.116.110)
Laba Setelah Pajak								246.385.411.817	246.385.411.817
Pendapatan (Beban) Komprehensif lain tahun berjalan					8.670.796.917				8.670.796.917
Saldo Per 31 Desember 2022	426.990.000.000	63.348.433.033	164.914.943.524	-	21.440.410.837	7.716.601.275	488.960.261.890	246.385.411.817	1.419.756.062.376

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
LAPORAN ARUS KAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	2022	2021
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Penerimaan Bunga	860.771.670.091	738.397.805.016
Pembayaran Bunga	(259.522.375.375)	(214.459.344.705)
Pembayaran Kepada Karyawan	(192.142.559.843)	(194.039.549.773)
Pembayaran Beban Umum dan Administrasi	(132.039.632.051)	(103.085.226.172)
Penerimaan Pendapatan Lainnya	77.916.988.560	82.683.994.973
Pembayaran Beban Lainnya	(29.934.029.827)	(31.111.801.886)
Aset dan Kewajiban Operasi	325.050.061.554	278.385.877.453
Penurunan/(Kenaikan) Aset Operasi :		
Kredit Yang Diberikan	(658.345.033.069)	(1.036.070.317.460)
Aset Lain-lain	(12.427.357.521)	(15.787.654.972)
Kenaikan/(Penurunan) Liabilitas Operasi:		
Liabilitas Segera	628.923.237.579	660.360.495.478
Beban Yang Masih Harus Dibayar	(23.818.259.842)	(13.790.967.686)
Simpanan Nasabah:		-
Pihak Berelasi	199.636.370.787	186.260.414.226
Pihak Ketiga	(34.094.730.615)	1.785.206.903.725
Simpanan dari Bank Lain	25.000.000.000	(125.000.000.000)
Pembayaran Pajak Penghasilan	(66.729.293.400)	(64.341.144.095)
Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi	383.194.995.473	1.655.223.606.669
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Efek - efek	(1.705.538.765.307)	(735.545.274.140)
Pembelian Aset Tetap	(7.043.934.830)	(10.991.241.526)
Pembelian Aset Tidak berwujud	147.031.654	(601.227.000)
Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi	(1.712.435.668.482)	(747.137.742.665)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Pembayaran Pinjaman yang Diterima	7.014.586.263	21.959.346.249
Penambahan Modal Disetor	29.816.295.426	24.167.386.820
Pembayaran Dividen	(102.504.746.149)	(92.205.094.531)
CSR	(15.202.116.110)	-
Pendapatan Komprehensif	8.670.796.917	3.350.544.421
Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(72.205.183.653)	(42.727.817.042)
Kenaikan/(Penurunan) Kas dan Setara Kas	(1.401.445.856.662)	865.358.046.962
Kas dan Setara Kas Awal Periode	3.724.382.243.679	2.859.024.196.716
Kas dan Setara Kas Akhir Periode	2.322.936.387.016	3.724.382.243.679
Kas dan Setara Kas, terdiri dari		
Kas	152.060.558.750	223.579.335.750
Giro Bank Indonesia	911.669.842.388	349.461.255.783
Giro Pada Bank Lain	363.809.563.426	5.119.882.571
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	895.396.422.452	3.146.221.769.575
Jumlah Kas dan Setara Kas	2.322.936.387.016	3.724.382.243.679

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum Bank

PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, untuk selanjutnya disebut "PT Bank Sulteng" atau "Bank", yang mulanya bernama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah didirikan berdasarkan Peraturan Daerah No. 6 tahun 1966 tentang Bank Pembangunan Daerah dan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 1999.

Sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 23 tanggal 30 April 1999 yang dibuat oleh Notaris Anand Umar Adnan, SH., berkedudukan di Palu, maka BPD Sulteng telah berubah statusnya dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) dan bernama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, serta telah mendapat pengesahan sesuai Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-12841 HT .01.01 TH 99 tanggal 12 Juli 1999 dan telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri No. 584.52-442 tanggal 10 Mei 1999 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah No. 02 tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) dan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. I/29/KEP.GBI/1999 tanggal 10 Desember 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah.

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui Akta Notaris Farid, SH No. 20 tanggal 11 Maret 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat RUPS LB PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pendirian Bank adalah untuk mendorong pertumbuhan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu alat kegiatan ekonomi di bidang keuangan/perbankan untuk pengelolaan sumber pendapatan asli daerah, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- 2) Memberikan kredit;
- 3) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- 4) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- 5) Membeli melalui pelanggan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut dicairkan secepatnya;
- 6) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan serta sewa guna usaha pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan serta sewa guna usaha, modal ventura perusahaan efek asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- 7) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dana pensiun yang berlaku;
- 8) Membantu Pemda dalam membina BPR milik Pemda Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten;
- 9) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

c. Jaringan Kantor

Bank berkantor pusat di Jl. Hasanuddin Nomor 20 Palu, Sulawesi Tengah. Bank mengklasifikasikan Kantor Cabang menjadi Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas dan Unit Pelayanan. Jumlah kantor dan jaringan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Kantor Pusat	1	1
Kantor Cabang Utama	1	1
Kantor Cabang	14	13
Kantor Cabang Pembantu	10	10
Kantor Kas	8	7
Kantor Fungsional Non Operasional	-	1
Kantor Pelayanan Kas (Payment Point)	34	34
Kantor Kas Mobil berjalan (Service Mobile)	1	14
Anjungan Tunai Mandiri	117	116
Jumlah	186	197

d. Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022	2021
<u>Dewan Komisaris</u>		
Komisaris Utama/Independen	-	-
Komisaris Independen	-	Amiludin Haludin
Komisaris	Hj. Maimun Lawira	-
Komisaris	Tinus Nuanto	-
<u>Direksi</u>		
Direktur Utama	-	-
Direktur Operasional	Hj. Ramiyatie	-
Direktur Bisnis	-	-
Direktur Kepatuhan	Ir. Judy Koagow	Ir. Judy Koagow

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

d. Dewan Komisaris dan Direksi (lanjutan)

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Adapun susunan keanggotaan komite-komite tersebut adalah sebagai

	2022	2021
<u>Komite Audit</u>		
Ketua	-	-
Anggota	Hj. Maimun Lawira	Muliati
Anggota	Tinus Nuanto	Dahlan Lasaki
Anggota	Nurmarjani Loulembah	-
Anggota	Adolf Nelson Rompas	-
<u>Komite Pemantau Risiko</u>		
Ketua	-	Amiludin Haludin
Anggota	Hj. Maimun Lawira	-
Anggota	Tinus Nuanto	-
Anggota	H.Muhtar Lutfi	H.Muhtar Lutfi
Anggota	Benny Wowor	-
<u>Komite Remunerasi dan Nominasi</u>		
Ketua	-	Amiludin Haludin
Anggota	Hj. Maimun Lawira	-
Anggota	Tinus Nuanto	-
Anggota	I Gusti Putu Suartika	I Gusti P.Suartika

Pengangkatan Komisaris dan Direksi

Pada tanggal 11 Maret 2022, Para Pemegang Saham mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa dan mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Independen : Moh Hidayat Lamakarate *)
 Komisaris Independen : Maksy M. Sarkawi**)

Direksi

Direktur Utama : Silas Djumaa**)
 Direktur Bisnis : Myrna Rianasari*)

*) Telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan tetapi belum dilantik oleh Gubernur Sulawesi Tengah selaku Pemegang Saham Pengendali sehingga berdasarkan POJK 27 /POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, belum dapat menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai Komisaris maupun Direksi.

***) Belum lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga berdasarkan POJK 27 /POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, belum dapat menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai Direksi.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Kebijakan akuntansi yang penting, yang diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan Bank untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK - IAI).

b. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan Bank disusun dengan konsep nilai historis dan atas dasar akrual, kecuali untuk beberapa hal dibawah ini:

- 1) Instrumen keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diukur pada nilai wajar.
- 2) Aset keuangan tersedia untuk dijual diukur pada nilai wajar.
- 3) Liabilitas imbalan pasti diakui sebesar nilai kini liabilitas imbalan pasti dikurangi dengan aset bersih dana pensiun ditambah keuntungan aktuarial yang belum diakui dikurangi beban jasa lalu yang belum diakui dan kerugian aktuarial yang belum diakui.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk keperluan laporan arus kas, yang termasuk kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dan Sertifikat Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan Bank adalah mata uang Rupiah (Rp). Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali dinyatakan lain, disajikan dalam Rupiah penuh.

c. Instrumen Keuangan

1) Aset Keuangan

Bank mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori (a) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (b) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya, dan (c) aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Bank menggunakan 2 (dua) dasar untuk mengklasifikasikan aset keuangan yaitu model bisnis Bank dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

Pengujian SPPI

Sebagai langkah pertama dari proses klasifikasi, Bank menilai persyaratan kontraktual keuangan untuk mengidentifikasi apakah mereka memenuhi pengujian SPPI.

Pokok pinjaman untuk tujuan pengujian ini didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal dan dapat berubah selama umur aset keuangan (misalnya, jika ada pembayaran pokok atau amortisasi premi/diskon). Elemen bunga yang paling signifikan dalam perjanjian kredit biasanya adalah pertimbangan atas nilai waktu dari uang dan risiko kredit. Untuk membuat penilaian SPPI, Bank menerapkan pertimbangan dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan seperti mata uang dimana aset keuangan didenominasikan dan periode pada saat suku bunga ditetapkan.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

1) Aset Keuangan (lanjutan)

Sebaliknya, persyaratan kontraktual yang memberikan eksposur lebih dari de minimis atas risiko atau volatilitas dalam arus kas kontraktual yang tidak terkait dengan dasar pengaturan pinjaman, tidak menimbulkan arus kas kontraktual SPPI atas jumlah saldo. Dalam kasus seperti itu, aset keuangan diharuskan untuk diukur pada Fair Value through Profit Loss (FVTPL).

Penilaian model bisnis

Bank menentukan model bisnisnya berdasarkan tingkat yang paling mencerminkan bagaimana Bank mengelola kelompok atas keuangannya untuk mencapai tujuan bisnisnya.

Penilaian model bisnis didasarkan pada skenario yang diharapkan secara wajar tanpa mempertimbangkan skenario "worst case" atau "stress case". Jika arus kas setelah pengakuan awal direalisasikan dengan cara yang berbeda dari yang awal diharapkan, Bank tidak mengubah klasifikasi aset keuangan dimiliki yang tersisa dalam model bisnis tersebut, tetapi memasukkan informasi tersebut dalam melakukan penilaian atas aset keuangan yang baru atau yang baru dibeli selanjutnya.

a) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali tes model bisnis dan tes arus kas kontraktual menunjukkan bahwa aset keuangan masuk ke dalam klasifikasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Klasifikasi ini ditujukan untuk Instrumen keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh Bank untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan yang dikategorikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini.

Aset keuangan yang diklasifikasikan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah dimiliki untuk mencadangkan liabilitas asuransi Entitas Anak yang diukur pada nilai wajar dari aset terkait. Instrumen keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal, biaya transaksi diakui secara langsung ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar, penjualan instrumen keuangan dan pendapatan bunga dari instrumen keuangan dalam kelompok diperdagangkan diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang dicatat di akun pendapatan dari kelompok diperdagangkan - neto.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

1) Aset Keuangan (lanjutan)

b) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan dan persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (solely payments of principal and interest) dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awalnya, instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya dimana keuntungan atau kerugian atas perubahan nilai wajar, keuntungan atau kerugian atas selisih kurs, dan kerugian penurunan nilai, diakui sebagai penghasilan komprehensif lain. Dividen dari Instrumen ekuitas diakui di dalam pos laba rugi.

Kerugian kredit ekspektasian diakui sebagai penambah dari penghasilan komprehensif lainnya di dalam laporan posisi keuangan (tidak mengurangi jumlah tercatat aset keuangan dalam laporan keuangan). Pendapatan bunga dihitung menggunakan metode suku bunga efektif.

c) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (solely payments of principal and interest) dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Pendapatan bunga dari aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan diakui sebagai "Pendapatan bunga". Ketika penurunan nilai terjadi, kerugian penurunan nilai diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat aset keuangan dan diakui didalam laporan keuangan sebagai "Pembentukan cadangan kerugian penurunan

2) Liabilitas Keuangan

Bank mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori (a) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan (b) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

a) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Kategori ini terdiri dari dua sub-kategori: liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh Bank untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

2) Liabilitas Keuangan(lanjutan)

a) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai pendapatan dari kelompok diperdagangkan - neto. Beban bunga dari liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dicatat di akun pendapatan kelompok diperdagangkan - neto.

Jika Bank pada pengakuan awal telah menetapkan instrumen utang tertentu sebagai nilai wajar melalui laba rugi (opsi nilai wajar), maka selanjutnya, penetapan ini tidak dapat diubah.

Perubahan nilai wajar terkait dengan liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diakui di dalam pendapatan kelompok diperdagangkan - neto. Beban Bunga dari liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat di akun pendapatan kelompok diperdagangkan - neto.

b) Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Bank mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
- Liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan.
- Kontrak jaminan keuangan.
- Komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga di bawah pasar.
- Imbalan kontinjensi yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar dikurangi biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, Bank mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif diakui sebagai "Beban bunga".

3) Hapus Buku

Dalam hal penghapusbukuan aset keuangan merupakan kelanjutan dari Tindakan penyelesaian aset keuangan dengan cara pengambilalihan agunan, maka jumlah yang dihapus buku adalah sebesar selisih kurang antara nilai wajar agunan yang diambil alih setelah memperhitungkan taksiran biaya penjualan dengan nilai tercatat aset keuangan.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

3) Hapus Buku (lanjutan)

Aset keuangan dapat dihapus buku apabila cadangan kerugian penurunan nilai telah dibentuk 100%.

Penghapusbukuan dilakukan secara keseluruhan terhadap nilai tercatat aset keuangan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

4) Reklasifikasi Aset Keuangan

Bank tidak melakukan reklasifikasi instrumen keuangan dari atau ke klasifikasi yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi selama instrumen keuangan tersebut dimiliki atau diterbitkan.

Bank tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Bank sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Bank mereklasifikasi aset keuangan dari diukur pada nilai wajar jika aset keuangan tersebut tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali dalam waktu dekat.

5) Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- a) Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- b) Jika tidak terdapat pasar utama, dipasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Nilai wajar suatu aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset dan liabilitas tersebut dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomik terbaiknya. Pengukuran nilai wajar aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Bank menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

5) Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1 : Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset dan liabilitas dan identik.
- Level 2 : Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas baik secara langsung atau secara tidak langsung.
- Level 3 : Input untuk aset dan liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Bank menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

6) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Penerapan PSAK 71 "Instrumen Keuangan" telah mengubah metode perhitungan kerugian penurunan nilai dari pendekatan kerugian yang telah terjadi (incurred loss) dalam PSAK 55 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dengan pendekatan kerugian kredit ekspektasian (expected credit loss).

Bank mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada instrument keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Tidak ada penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada investasi instrumen ekuitas.

Bank mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian seumur hidup, kecuali untuk hal berikut, diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan:

- a) Instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan; dan
- b) Instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Bank menganggap instrumen utang memiliki risiko kredit yang rendah Ketika peringkat risiko kreditnya setara dengan definisi investment grade yang dipahami secara global.

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dicatat pada akun penyisihan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang terhadap aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Jika pada suatu periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara objektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur atau penerbit), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada periode berjalan.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

6) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (lanjutan)

Kerugian kredit ekspektasian untuk instrumen utang yang diukur pada nilai wajar tidak mengurangi nilai tercatat di dalam aset keuangan di laporan posisi keuangan.

Kerugian kredit ekspektasian diakui sebagai penambah dari penghasilan komprehensif lainnya di dalam laporan posisi keuangan.

Instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar tidak dilakukan penilaian penurunan nilai sesuai PSAK 71.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan, pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan Kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun-tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain bunga.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian

Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

- a) Aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu selisih antara arus kas yang terutang kepada Bank sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Bank);
- b) Aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi;
- c) Komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini jumlah arus kas jika komitmen ditarik dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Bank; dan
- d) Kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan.

Dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian, Bank mengelompokkan aset keuangan kedalam 3 stage sebagai berikut:

- Stage 1 : mencakup instrumen keuangan yang tidak memiliki peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal atau memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan. Untuk instrumen-instrumen keuangan ini, akan berlaku perhitungan ECL 12 bulan. Aset keuangan di dalam stage 1 termasuk fasilitas dimana risiko kredit telah membaik dan aset keuangan dapat direklasifikasi dari stage 2.
- Stage 2 : mencakup instrumen keuangan yang mengalami peningkatan risiko kredit sejak pengakuan awal (kecuali Bank merasa risiko kredit tergolong rendah pada tanggal pelaporan) namun belum terbukti adanya bukti penurunan nilai secara objektif. Untuk instrumen-instrumen ini, akan berlaku perhitungan ECL Seumur Hidup. ECL Seumur Hidup adalah kerugian kredit ekspektasian yang diharapkan dari semua kejadian gagal bayar yang mungkin terjadi selama perkiraan umur dari instrumen keuangan tersebut. Stage 2 juga mencakup fasilitas dimana risiko kredit telah membaik dan aset keuangan telah direklasifikasi dari Stage 3.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

6) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (lanjutan)

Stage 3 : mencakup instrumen keuangan yang telah terbukti mengalami penurunan nilai secara objektif pada tanggal pelaporan. Kelompok ini biasanya terdiri atas debitur yang mengalami gagal bayar. Bank mencatat cadangan ECL Seumur Hidup.

Evaluasi penurunan nilai didasarkan pada konsep Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD), dan Exposure at Default (EAD) yang mempertimbangkan informasi masa lalu, terkini, dan masa mendatang.

Bank menggunakan metode migration analysis untuk setiap group kredit per-Bank (Bankwide) berdasarkan data historis tunggakan selama 5 tahun dalam menentukan PD.

Bank menggunakan metode (i) Historical, (ii) Diminish Balance dan (iii) Value to Loan dalam menentukan nilai LGD dari setiap debitur. LGD menggambarkan persentase nominal fasilitas yang tidak akan dapat direcover oleh Bank terhadap debitur default. LGD biasa dihitung dengan 1-Recovery Rate. Recovery rate dihitung mempertimbangkan Time Value of Money dari pengembalian dari kewajiban yang telah default. Tingkat suku bunga yang digunakan untuk menghitung Time Value of Money dari Recovery adalah EIR awal.

Pengukuran ECL berdasarkan PSAK 71 mewajibkan Bank untuk memodelkan ECL sesuai dengan skenario forward-looking yang ada, dengan mempertimbangkan kemungkinan ekonomi baik dan buruk. Oleh karena itu, nilai ECL yang dihasilkan Bank harus berdasarkan hasil probabilitas dari tiga skenario (kasus ekonomi normal/normal, baik/good, dan buruk/bad). PD dan LGD akan dihitung menurut tiga skenario dengan nilai makro-ekonomi sesuai dengan skenario-skenario tersebut. Untuk segmentasi beragunan (secured), LGD juga akan dihitung berdasarkan tiga skenario ketika data sudah mencukupi. Bobot dari skenario baik, normal dan buruk dapat disesuaikan seiring dengan perubahan kondisi ekonomi dan diskresi Bank.

d. Kas dan Setara Kas

Kas (terutama terdiri dari kas di kasan dan kas di ATM) dan setara kas mencakup kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain dan investasi jangka pendek likuid lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal perolehan.

e. Giro pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi. Sebelum 1 Januari 2020, Giro pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

f. Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain adalah penanaman dana pada Bank Indonesia berupa Deposit Facility, Term Deposit dan Deposit Facility Syariah, sedangkan penempatan dana pada bank lain merupakan penanaman dana dalam bentuk penempatan pada pasar uang (inter-bank call money), deposito berjangka, dan banker's acceptance.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lain (lanjutan)

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan masing-masing sebagai biaya perolehan diamortisasi. Sebelum 1 Januari 2020, Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga keuangan lain diklasifikasikan masing-masing sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

g. Efek-efek

Efek-efek yang dimiliki terdiri dari obligasi yang diperdagangkan di bursa efek.

Efek-efek diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo.

Efek-efek pada awalnya disajikan sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi dan setelah pengakuan awal dicatat sesuai dengan klasifikasi sebagai dimiliki hingga jatuh tempo.

Efek-efek dengan klasifikasi dimiliki hingga jatuh tempo dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Bila terjadi penjualan atau reklasifikasi dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan dari efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo yang (a) belum mendekati tanggal jatuh tempo, (b) sebelum diperolehnya jumlah pokok aset keuangan secara substansial dan (c) bukan kejadian yang berada di luar kendali entitas, tidak berulang dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh entitas akan menyebabkan reklasifikasi atas semua efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo ke dalam kelompok tersedia untuk dijual, dan Bank tidak diperkenankan untuk mengklasifikasikan efek-efek sebagai dimiliki hingga jatuh tempo untuk tahun berjalan dan untuk kurun waktu dua tahun mendatang.

Cadangan kerugian penurunan nilai diukur bila terdapat indikasi penurunan nilai dengan menggunakan metodologi penurunan nilai.

h. Kredit Yang Diberikan

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan masing-masing sebagai biaya perolehan diamortisasi. Sebelum 1 Januari 2020, Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga keuangan lain diklasifikasikan masing-masing sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga.

Kredit yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Kredit Yang Diberikan (lanjutan)

Kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi. Sebelum 1 Januari 2020, kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

Kredit dalam rangka pembiayaan bersama (kredit sindikasi) dinyatakan sebesar pokok kredit sesuai dengan porsi risiko yang ditanggung oleh Bank.

Kredit yang direstrukturisasi disajikan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi atau nilai kini penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi. Kerugian akibat selisih antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi dengan nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain interim. Setelah restrukturisasi, semua penerimaan kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru dicatat sebagai pengembalian pokok kredit yang diberikan dan pendapatan bunga sesuai dengan syarat-syarat restrukturisasi.

Kredit yang diberikan dihapusbukukan, ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian di masa datang dan semua jaminan telah diupayakan untuk direalisasi atau sudah diambil alih. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai. Pelunasan kemudian atas kredit yang telah dihapusbukukan sebelumnya, dikreditkan ke cadangan kerugian penurunan nilai di laporan posisi keuangan.

i. Aset Tetap

Berdasarkan PSAK No. 16 (Revisi 2011), "Aset Tetap", Bank memilih untuk menggunakan metode biaya untuk mengukur Aset Tetapnya. Aset tetap, kecuali tanah, dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai (jika ada).

Aset tetap, kecuali tanah dan bangunan, disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun ganda (double-declining balance method). Bangunan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method). Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan mengalokasikan harga perolehan sepanjang estimasi masa manfaatnya sebagai berikut:

	<u>Metode</u>	<u>Umur Ekonomis</u>	<u>Persentase</u>
Bangunan:			
Bangunan Permanen	Garis Lurus	20 Tahun	5%
Bangunan Non Permanen	Garis Lurus	10 Tahun	10%
Bukan Bangunan:			
Kelompok I	Saldo Menurun Berganda	4 Tahun	50%
Kelompok II	Saldo Menurun Berganda	8 Tahun	25%
Kelompok III	Saldo Menurun Berganda	16 Tahun	12,5%
Kelompok IV	Saldo Menurun Berganda	20 Tahun	10%

Metode penyusutan, umur manfaat dan nilai sisa tetap ditelaah minimal setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian terhadap beban penyusutan tahun berjalan.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Aset Tetap (lanjutan)

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dicatat sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat dikapitalisasi dan disusutkan. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang telah dijual dikeluarkan dari kelompok Aset Tetap yang bersangkutan, dan atas laba atau rugi yang diperoleh/diderita dilaporkan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun yang bersangkutan.

Jumlah tercatat Aset Tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi komprehensif pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Nilai Perolehan Tanah adalah semua biaya dan beban yang terjadi sehubungan dengan perolehan hak atas tanah, antara lain, biaya perizinan, biaya dan pengukuran lokasi, biaya dan pajak-pajak yang berhubungan dengan hal tersebut, ditangguhkan dan disajikan secara terpisah dari biaya perolehan hak atas tanah yang ditangguhkan tersebut disajikan sebagai bagian dari akun "Aset Lain-Lain" dalam laporan posisi keuangan, dan diamortisasi selama masa manfaat hak atas tanah yang bersangkutan dengan menggunakan metode garis lurus dan juga menyatakan bahwa hak atas tanah tidak diamortisasi kecuali memenuhi kondisi-kondisi tersebut yang telah ditentukan.

Apabila nilai tercatat aset lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai yang dipakai.

Apabila Aset Tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya dihapuskan dari akun tersebut. Keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank melakukan penelaahan untuk memutuskan apakah terdapat indikasi penurunan nilai.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar harga perolehan dan disajikan sebagai bagian dari Aset Tetap. Akumulasi harga perolehan akan direklasifikasi ke masing masing Aset Tetap pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan, dan penyusutan mulai dibebankan pada saat itu.

Sewa

Sejak 1 Januari 2020 Bank menerapkan PSAK 73: Sewa untuk seluruh sewa dengan mengakui aset hak guna dan liabilitas terkait, dengan 2 pengecualian yaitu aset pendasar bernilai rendah dan sewa jangka pendek.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Aset Tetap (lanjutan)

Pada tanggal insepisi suatu kontrak, Bank menilai apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset selama suatu jangka waktu tertentu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Untuk menilai apakah suatu kontrak memberikan hak untuk mengendalikan suatu aset identifikasian, Bank menilai apakah:

- 1) Kontrak melibatkan penggunaan suatu aset identifikasian;
- 2) Bank memiliki hak untuk memperoleh secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset selama periode penggunaan; dan
- 3) Bank memiliki hak untuk mengendalikan aset identifikasian dalam bentuk:
 - a) Bank memiliki hak untuk mengoperasikan aset.
 - b) Bank mempunyai hak untuk menetapkan tujuan apa aset akan digunakan

Pada tanggal insepisi atau pada saat penilaian kembali suatu kontrak yang mengandung suatu komponen sewa, Bank mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa. Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi:

- 1) Pembayaran lunas dimuka;
- 2) Pembayaran angsuran tetap;
- 3) Pembayaran angsuran sewa berubah yang bergantung pada fluktuasi pembayaran sewa yang ditetapkan oleh *counter part*.

Bank mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak-guna awalnya diukur pada biaya perolehan, yang terdiri dari jumlah pengukuran awal dari liabilitas sewa disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan.

Setelah tanggal permulaan, aset hak-guna diukur dengan model biaya. Aset hak-guna diukur sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi penurunan nilai serta disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa. Liabilitas sewa diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Bunga inkremental sewa mengacu pada *cost corporate bond* Bank dan tingkat suku bunga pinjaman entitas anak.

Sewa jangka pendek dengan durasi kurang dari 12 bulan dan sewa aset bernilai rendah, serta elemen-elemen sewa tersebut, sebagian atau seluruhnya tidak menerapkan prinsip-prinsip pengakuan yang ditentukan oleh PSAK 73 akan diperlakukan sama dengan sewa operasi pada PSAK 30. Bank akan mengakui pembayaran sewa tersebut dengan dasar garis lurus selama masa sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Beban ini ditunjukkan pada beban umum dan administrasi dalam laporan laba rugi.

j. Aset Tak Berwujud

Aset tidak berwujud diakui jika, dan hanya jika, biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal dan kemungkinan besar Bank akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut. Aset tak berwujud terdiri dari perangkat lunak yang dibeli Bank.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Aset Tak Berwujud (lanjutan)

Perangkat lunak yang dibeli oleh Bank dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Metode amortisasi, estimasi masa manfaat dan nilai residual pada setiap akhir tahun pelaporan dan disesuaikan jika dianggap tepat.

k. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan

Bank menerapkan secara prospektif PSAK No.48 (Revisi 2014), "Penurunan Nilai Aset".

PSAK No.48 (Revisi 2014) menetapkan prosedur-prosedur yang diterapkan entitas agar aset dicatat tidak melebihi jumlah terpulihkannya. Suatu aset dicatat melebihi jumlah terpulihkannya jika jumlah tersebut melebihi jumlah yang akan dipulihkan melalui penggunaan atau penjualan aset. Pada kasus demikian, aset mengalami penurunan nilai. PSAK yang direvisi ini juga menentukan kapan entitas akan membalik suatu rugi penurunan nilai dan pengungkapan yang diperlukan.

Pada setiap akhir periode pelaporan, Bank menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian pada tanggal laporan atas penurunan nilai aset tertentu (yaitu aset tidak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, aset tidak berwujud yang belum dapat digunakan, atau goodwill yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis) diperlukan, maka Bank akan membuat estimasi atas jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau unit penghasilan kas (UPK) dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi komprehensif sebagai "rugi penurunan nilai". Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilai pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko spesifik aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Bank menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dibuatkan oleh pengali penilaian atau indikator nilai wajar yang tersedia.

Kerugian penurunan nilai dari operasi berkelanjutan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi komprehensif sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi aset yang diturunkan nilainya dan mensyaratkan manajemen Bank untuk menelaah nilai aset untuk setiap penurunan dan penghapusan ke nilai wajar jika keadaan menunjukkan bahwa nilai tercatat tidak bisa diperoleh kembali. Di lain pihak, pemulihan kerugian penurunan nilai diakui apabila terdapat indikasi bahwa penurunan nilai tersebut tidak lagi terjadi. Penurunan (pemulihan) nilai aset diakui sebagai beban (pendapatan) pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain periode berjalan.

l. Biaya dibayar di muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method).

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

l. Biaya dibayar di muka (lanjutan)

Liabilitas segera merupakan liabilitas Bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dan dihitung berdasarkan biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas sewa yang terbentuk dari transaksi sewa sesuai PSAK 73 diklasifikasikan sebagai liabilitas segera. Liabilitas sewa tersebut akan diamortisasi sesuai periode kontrak sewa.

m. Simpanan Nasabah

Simpanan dari nasabah adalah dana yang ditempatkan oleh masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Termasuk dalam akun ini adalah giro, tabungan, deposito berjangka dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

Giro merupakan simpanan nasabah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui cek, kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), atau dengan cara pemindahbukuan dengan bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya.

Tabungan merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati.

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan Bank.

Simpanan nasabah diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif kecuali simpanan yang dinyatakan sebesar kewajiban Bank kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan nasabah dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

n. Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain terdiri dari liabilitas terhadap bank lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka dan interbank call money.

Simpanan dari bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif. Biaya tambahan yang jumlahnya signifikan dan dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan dari bank lain dikurangkan dari jumlah simpanan yang

o. Pinjaman yang Diterima

Pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima dari pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman yang diterima diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan pinjaman dikurangkan dari jumlah pinjaman yang diterima.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Pendapatan dan Beban Bunga

Pendapatan dan beban bunga diakui pada laporan laba rugi komprehensif dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih cepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi, dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga efektif awal.

Kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya telah lewat 90 (Sembilan puluh) hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu diragukan, secara umum diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai (impairment) dan pendapatan bunga tersebut akan dibatalkan pada saat kredit diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai.

q. Pajak Penghasilan

Bank menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2014) "Pajak Penghasilan".

Beban pajak tahun berjalan ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer aset dan liabilitas antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan saldo rugi fiskal yang belum dikompensasikan, sepanjang perbedaan temporer dan rugi fiskal yang belum dikompensasikan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal posisi laporan keuangan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba fiskal yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan yang telah diakui sebelumnya.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang telah secara substantif telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan untuk dan/atau pembalikan seluruh perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, diakui sebagai "Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Tangguhan" dan termasuk dalam laba atau rugi neto tahun berjalan, kecuali untuk transaksi transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Perubahan terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat penetapan pajak diterima atau jika Bank mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan telah ditetapkan.

Aset dan liabilitas atas pajak tangguhan dan pajak kini dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus.

r. Imbalan Kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terhutang kepada karyawan berdasarkan metode akrual.

Imbalan kerja jangka pendek seperti gaji, tunjangan, insentif dan imbalan jangka pendek lainnya diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan kerja jangka pendek diukur sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Program imbalan kerja jangka panjang dan imbalan pasca kerja

Imbalan kerja jangka panjang dan imbalan pasca kerja seperti pensiun, uang duka dan penghargaan dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai yang memenuhi kriteria. Imbalan kerja ditentukan berdasarkan peraturan Bank dan persyaratan minimum Undang Undang Tenaga Kerja No. 13/2003.

Bank memiliki program pensiun imbalan pasti untuk karyawan tetapnya. Program pensiun imbalan pasti didanai melalui pembayaran kepada Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Sulteng yang ditentukan dengan perhitungan aktuaris secara berkala, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi No.49/SK/BPD-ST/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dan telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia No.KEP-836/KM.10/2011 tanggal 14 November 2011 dan telah diubah berdasarkan SK Direksi No.50/SK/BPD-ST/2015 tanggal 31 Juli 2015 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No.Kep-566/NB.1/2015 tanggal 17 November 2015.

Program manfaat pasti merupakan program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun yang biasanya tergantung pada satu faktor atau lebih seperti umur, masa kerja dan jumlah kompensasi.

Jumlah kontribusi karyawan dalam program pensiun ini ditetapkan sebesar 5% dari gaji dasar karyawan yang bersangkutan dan sisanya ditanggung oleh Bank.

Beban liabilitas masa lampau diakui secara langsung di laporan laba rugi, kecuali pembayaran imbalan tersebut tergantung pada apakah karyawan tetap bekerja selama periode waktu tertentu (periode vesting). Dalam hal ini biaya jasa lalu diamortisasi secara metode garis lurus sepanjang periode vesting.

Liabilitas imbalan kerja merupakan nilai kini liabilitas imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan dikurangi nilai wajar aset program serta disesuaikan dengan keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Liabilitas imbalan pasti dihitung sekali setahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode projected unit kredit.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Imbalan Kerja (lanjutan)

Keuntungan atau kerugian aktuarial dari penyesuaian dan perubahan asumsi aktuarial sebagai kelebihan atas nilai yang lebih tinggi antara 10% dari nilai wajar aset program atau 10% dari nilai kini liabilitas imbalan pasti pada awal periode diamortisasi dan diakui sebagai biaya atau keuntungan selama perkiraan rata-rata sisa tahun jasa pegawai yang telah memenuhi kriteria.

Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskonto estimasi arus kas keluar masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah (dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan imbalan yang akan dibayarkan dan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo imbalan yang bersangkutan.

Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskonto estimasi arus kas keluar masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah (dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan imbalan yang akan dibayarkan dan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo imbalan yang bersangkutan.

Bank harus menyediakan program pensiun dengan imbalan minimal tertentu sesuai dengan UU Ketenagakerjaan. Karena UU Ketenagakerjaan menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya jumlah program pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti. Perhitungan imbalan pensiun yang dilakukan oleh aktuaris menunjukkan bahwa perkiraan imbalan yang disediakan oleh dana pensiun Bank akan melebihi imbalan pensiun minimal yang ditentukan oleh UU Ketenagakerjaan, oleh karena itu, Bank tidak perlu melakukan penyesuaian atas imbalan pensiun yang disediakannya.

Program imbalan jangka panjang lainnya

Diluar program pensiun imbalan pasti, Bank juga memberikan imbalan yang bersifat jangka panjang lainnya, yaitu meliputi penghargaan masa kerja, dan uang duka, penghargaan akhir masa jabatan direksi dan komisaris dan tunjangan hari tua pegawai dan direksi.

Sama seperti imbalan pensiun, liabilitas dan beban pendanaan penghargaan masa kerja, dan uang duka, penghargaan akhir masa jabatan direksi dan komisaris dan tunjangan hari tua pegawai dan direksi dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode projected unit credit.

Bonus dan tantiem

Bank juga memberikan bonus kepada karyawan serta tantiem kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Estimasi besarnya cadangan tersebut ditentukan berdasarkan pengalaman-pengalaman tahun sebelumnya, dengan memperhatikan kemampuan keuangan Bank, dan kemudian dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Jika terdapat selisih antara jumlah bonus yang dicadangkan dengan realisasinya, maka selisih tersebut dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.

Uang penghargaan bagi Direksi

Bank memberikan uang penghargaan kepada Direksi pada setiap akhir masa jabatannya. Besarnya uang penghargaan Direksi secara bersama-sama ditetapkan sebesar 2.5% dari laba bersih setelah pajak tahun buku sebelum berakhirnya masa jabatan. Uang penghargaan tersebut dicadangkan secara proporsional tiap tahun selama masa jabatan, yang diakui sebagai beban pada tahun berjalan.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Penggunaan estimasi dan pertimbangan akuntansi yang signifikan

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan-pertimbangan, taksiran-taksiran dan asumsi yang mempengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dilaporkan.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Pertimbangan profesional dan estimasi signifikan dalam menentukan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Usaha yang berkelanjutan

Manajemen Bank telah melakukan penilaian atas kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Bank memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

Nilai wajar atas instrumen keuangan

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika statistik. Masukan (input) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model seperti tingkat pelunasan dipercepat dan asumsi tingkat gagal bayar.

Klasifikasi pada investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo

Bank mengklasifikasikan aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo. Klasifikasi memerlukan pertimbangan signifikan untuk memiliki investasi tersebut sampai dengan jatuh tempo. Dalam membuat pertimbangan ini, Bank mengevaluasi intensi dan kemampuan untuk memiliki investasi tersebut hingga jatuh tempo.

Aset keuangan tanpa harga kuotasi dalam pasar aktif

Bank mengklasifikasikan aset keuangan dengan mengevaluasi, yaitu antara lain, apakah aset memiliki harga kuotasi atau tidak dalam pasar aktif. Termasuk dalam evaluasi apakah aset keuangan memiliki kuotasi pasar dalam pasar aktif adalah penentuan apakah harga yang dikuotasi tersedia sewaktu-waktu dan apakah harga tersebut merepresentasikan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Penggunaan estimasi dan pertimbangan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

Penurunan nilai kredit yang diberikan dan piutang

Bank menelaah kredit yang diberikan yang signifikan secara individual dan piutang pada setiap tanggal laporan posisi keuangan untuk menilai apakah penurunan nilai harus dicatat dalam laporan laba rugi komprehensif. Secara khusus, justifikasi oleh manajemen diperlukan dalam estimasi jumlah dan waktu arus kas di masa mendatang ketika menentukan penurunan nilai. Dalam estimasi arus kas ini, Bank membuat justifikasi tentang situasi keuangan debitor dan nilai realisasi bersih agunan. Estimasi-estimasi ini didasarkan pada asumsi-asumsi tentang sejumlah faktor dan hasil aktual yang mungkin berbeda, yang tercermin dalam perubahan di masa mendatang penyisihan penurunan nilai tersebut.

Penurunan nilai efek dimiliki hingga jatuh tempo

Bank menelaah efek yang diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo pada setiap tanggal posisi keuangan untuk menilai apakah telah terjadi penurunan nilai. Penurunan nilai atas investasi tersebut dinilai apakah terdapat penurunan signifikan atau berkepanjangan nilai wajar dibawah nilai perolehan atau terdapat bukti objektif telah terjadi penurunan nilai. Penentuan apa yang dimaksud dengan “signifikan” dan “berkepanjangan” membutuhkan pertimbangan dari Bank. Dalam menentukan pertimbangan, Bank mengevaluasi diantaranya faktor, pergerakan harga pasar historis dan jangka waktu serta lama perpanjangan di mana nilai wajar dari investasi kurang dari biayanya.

Penurunan nilai atas aset tidak produktif

Bank melakukan penilaian atas penurunan nilai pada aset non finansial kapan saja terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat pada suatu aset mungkin tidak dapat diperoleh kembali. Faktor-faktor yang dianggap penting oleh Bank yang dapat memicu adanya ulasan atas penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- Kinerja dibawah rata-rata yang signifikan yang relatif terhadap hasil historis atau proyeksi hasil operasi yang diharapkan di masa yang akan datang;
- Perubahan yang signifikan dari cara penggunaan aset yang diperoleh atau strategi untuk bisnis secara keseluruhan; dan
- Tren negatif industri dan ekonomi yang signifikan.

Pengakuan pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh saldo rugi fiskal dan perbedaan temporer sampai pada batas adanya kemungkinan bahwa keuntungan yang dikenai pajak akan tersedia dimana kerugian dapat dimanfaatkan. Pertimbangan manajemen yang signifikan juga diperlukan untuk menentukan jumlah dari aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan waktu yang mungkin terjadi dan tingkatan dari keuntungan yang dikenakan pajak di masa yang akan datang bersama dengan strategi perencanaan pajak di masa yang akan datang.

Nilai sekarang dari kewajiban pensiun

Biaya untuk program pensiun manfaat pasti dan imbalan pasca kerja ditentukan menggunakan penilaian aktuarial. Penilaian aktuarial melibatkan pembuatan asumsi mengenai tingkat diskonto, tingkat pengembalian dari aset yang diharapkan, peningkatan gaji di masa depan, tingkat kematian dan peningkatan jumlah pensiun di masa depan. Karena sifat jangka panjang rencana-rencana ini, estimasi memiliki ketidakpastian yang signifikan.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

3. KAS

	2022	2021
Kas Besar	117.090.558.750	194.483.035.750
Kas ATM	34.970.000.000	29.096.300.000
Kas dalam Perjalanan	-	-
Jumlah	152.060.558.750	223.579.335.750

4. GIRO PADA BANK INDONESIA

	2022	2021
Giro Rupiah	911.669.842.388	349.461.255.783

Giro Wajib Miminum

Pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.20/3/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah melalui PBI No.22/3/PBI/2020 tanggal 24 Maret 2020, PBI No.22/10/PBI/2020 tanggal 28 Juli 2020, PBI No.23/16/PBI/2021 tanggal 17 Desember 2021 dan terakhir PBI No. 24/4/PBI/2022 tanggal 25 Februari 2022.

PBI tersebut dijelaskan lebih lanjut melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.20/10/PADG/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah beberapa kali melalui PADG No.20/30/PADG/2018 tanggal 30 November 2018, PADG No.21/14/PADG/2019 tanggal 26 Juni 2019, PADG No. 21/27/PADG/2019 tanggal 26 Desember 2019, PADG No.22/2/PADG/2020 tanggal 10 Maret 2020, PADG No.22/10/PADG/2020 tanggal 29 April 2020, PADG No.22/19/PADG/2020 tanggal 29 Juli 2020, PADG No.23/27/PADG/2021 tanggal 21 Desember 2021 dan terakhir PADG No. 24/8/PADG/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang menyatakan bahwa pemenuhan GWM dalam Rupiah Bank Umum Konvensional (BUK) ditetapkan sebesar 9%(sembilan persen) dengan persentase yang wajib dipenuhi secara harian sebesar 0% (nol persen) dan secara rata-rata sebesar 9% (sembilan persen) berlaku mulai tanggal 1 September 2022 . Bank Indonesia memberikan insentif bagi Bank yang menyalurkan kredit/pembiayaan kepada sektor prioritas dan UMKM dan/atau memenuhi target RPIM berupa pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM Rupiah rata-rata sampai dengan sebesar 1% (satu persen) mulai berlaku 1 Maret 2022 dan sampai dengan sebesar 2%(dua persen) mulai berlaku 1 September 2022. Pemenuhan GWM dalam Rupiah baik untuk BUK maupun Entitas Anak dihitung dengan membandingkan posisi saldo rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) dan dana Bank Indonesia Fast Payment (BI-Fast) dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) BUK dalam Rupiah selama periode laporan tertentu.

Namun terdapat pengecualian pengenaan sanksi GWM untuk peserta BI-Fast yang telah menyediakan dana BI-FAST berlaku sejak 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022. Perhitungan pemenuhan GWM Rupiah berdasarkan saldo rekening giro Rupiah pada BI-RTGS dan dana BI-FAST berlaku mulai tanggal 3 Januari 2022.

Peraturan tersebut juga mengatur mengenai remunerasi (sebelumnya disebut jasa giro) terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam Rupiah. Besaran bagian tertentu yang diberikan remunerasi adalah untuk pemenuhan kewajiban GWM dalam Rupiah secara harian sebesar 0% (nol persen) dan untuk pemenuhan kewajiban GWM dalam Rupiah secara rata-rata sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dan 9% (sembilan persen). Jasa giro dimaksud diberikan tingkat bunga sebesar 0% (nol persen) per tahun terhadap pemenuhan kewajiban GWM dalam Rupiah secara harian dan 1,5% (satu koma lima persen) per tahun terhadap pemenuhan kewajiban GWM dalam Rupiah secara rata-rata.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

4. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Penyangga Likuiditas Makroprudensial

Penyangga Likuiditas Makroprudensial, selanjutnya disebut PLM, adalah cadangan likuiditas minimum dalam Rupiah yang wajib dipelihara oleh BUK dalam bentuk surat berharga yang memenuhi persyaratan tertentu, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUK dalam Rupiah. Sedangkan bagi BUS, Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah (PLM Syariah) adalah cadangan likuiditas minimum dalam Rupiah yang wajib dipelihara oleh BUS dalam bentuk surat berharga syariah yang memenuhi persyaratan tertentu, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUS dalam Rupiah.

Pemenuhan PLM mengacu pada PBI No.20/4/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah sebanyak 3 (tiga) kali menjadi PBI No.21/12/PBJ/2019 tanggal 25 November 2019, PBI No.22/17/PBI/2020 tanggal 30 September 2020, dan PBI No.23/17/PBI/2021 tanggal 17 Desember 2021. PBI tersebut dijelaskan lebih lanjut melalui PADG No.21/22/PADG/2019 tanggal 28 November 2019, sebagaimana telah diubah sebanyak 3 (tiga) kali menjadi PADG No.22/11/PADG/2020 tanggal 29 April 2020, PADG No.22/30/PADG/2020 tanggal 5 Oktober 2020, dan PADG No.23/7/PADG/2021 tanggal 26 April 2021, dimana besaran PLM ditentukan sebesar 6% (enam persen) dari DPK BUK dalam Rupiah dan besaran PLM untuk Entitas Anak yang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip syariah adalah sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari DPK Entitas Anak dalam Rupiah.

Rasio Intermediasi Makroprudensial

Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dahulu disebut sebagai Loan to Funding Ratio (LFR). Berdasarkan PBI No.20/4/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, penyebutan LFR berubah menjadi Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dengan kewajiban pemenuhan Giro RIM mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2018. Peraturan tersebut telah disempurnakan sebanyak 3 (tiga) kali menjadi PBI No.21/12/PBI/2019 tanggal 25 November 2019, PBI No.23/17/PBI/2020 tanggal 30 September 2020, dan PBI No.23/17/PBI/2021 tanggal 17 Desember 2021. PBI tersebut dijelaskan lebih lanjut melalui PADG No.21/22/PADG/2019 tanggal 28 November 2019, sebagaimana telah diubah sebanyak 3 (tiga) kali menjadi PADG No.22/11/PADG/2020 tanggal 29 April 2020, PADG No.22/30/PADG/2020 tanggal 5 Oktober 2020, dan PADG No.23/7/PADG/2021 tanggal 26 April 2021.

Berdasarkan Peraturan tersebut, RIM adalah rasio hasil perbandingan antara:

- a. Kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan Valuta Asing; dan
- b. Surat berharga korporasi dalam Rupiah dan Valuta Asing yang memenuhi persyaratan tertentu yang dimiliki Bank, terhadap:
 - 1) DPK Bank dalam bentuk giro, tabungan dan simpanan berjangka/deposito dalam Rupiah dan Valuta asing, tidak termasuk dana antarbank;
 - 2) Surat berharga dalam Rupiah dan Valuta Asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diterbitkan oleh Bank untuk memperoleh sumber pendanaan; dan
 - 3) Pinjaman yang diterima dalam Rupiah dan Valuta Asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diterima oleh BUK untuk memperoleh sumber pendanaan.

Giro atas pemenuhan RIM yang selanjutnya disebut Giro RIM adalah saldo giro dalam Rekening Giro Rupiah di Bank Indonesia yang wajib dipelihara oleh Bank. Dalam hal RIM berada dalam kisaran Target RIM maka Giro RIM ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari DPK dalam rupiah. Sedangkan apabila RIM berada di luar kisaran Target RIM, maka Giro RIM ditetapkan sebesar hasil perkalian antara Parameter Disinsentif Bawah atau Parameter Disinsentif Atas, selisih antara RIM dan Target RIM, serta DPK dalam rupiah.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

4. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Rasio Intermediasi Makroprudensial (lanjutan)

Besaran dan parameter yang digunakan dalam pemenuhan Giro RIM ditetapkan:

- a. batas bawah Target RIM sebesar 84% (delapan puluh empat persen);
- b. batas atas Target RIM sebesar 94% (sembilan puluh empat persen);
- c. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Insentif sebesar 14% (empat belas persen);
- d. Parameter Disinsentif Bawah ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) sebesar 0 (nol), jika BUK memiliki rasio kredit bermasalah secara bruto lebih besar dari atau sama dengan 5% (lima persen);
 - 2) sebesar 0 (nol), jika Bank memiliki rasio kredit bermasalah secara bruto lebih besar dari atau sama dengan 5% (lima persen); atau KPMM lebih kecil dari atau sama dengan KPMM Insentif;
 - 3) sebesar 0,1 (nol koma satu), jika Bank memiliki rasio kredit bermasalah secara bruto lebih kecil dari 5% (lima persen); dan KPMM lebih besar dari KPMM Insentif dan lebih kecil dari atau sama dengan 19% (sembilan belas persen); dan
 - 4) sebesar 0,15 (nol koma lima belas), jika Bank memiliki rasio kredit bermasalah secara bruto lebih kecil dari 5% (lima persen); dan KPMM lebih besar dari 19% (sembilan belas persen); dan
- e. Parameter Disinsentif Atas ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) sebesar 0 (nol), jika Bank memiliki KPMM lebih besar dari atau sama dengan KPMM Insentif; atau
 - 2) sebesar 0 (nol), jika Bank memiliki KPMM lebih kecil dari KPMM Insentif.

Namun penetapan ketentuan ini akan dilakukan secara bertahap kepada Bank dengan kriteria:

- a. lebih kecil dari 75% (tujuh puluh lima persen) berlaku sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
- b. lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen) berlaku sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
- c. lebih kecil dari 84% (delapan puluh empat persen) berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022; dan
- d. sebesar:
 - 1) 75% (tujuh puluh lima persen) sampai dengan lebih kecil dari 84% (delapan puluh empat persen) berlaku untuk periode tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021; dan
 - 2) 80% (delapan puluh persen) sampai dengan lebih kecil dari 84% (delapan puluh empat persen) berlaku untuk periode tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, maka berlaku Parameter Disinsentif Bawah sebesar 0 (nol).

Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar:

	2022	2021
GWM Harian	0,00%	0,50%
GWM Rata-rata	9,15%	4,37%
RIM	82,98%	76,67%

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

5. GIRO PADA BANK LAIN

	2022	2021
Giro pada Bank Pemerintah		
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	725.566.571	298.679.263
PT. Bank Syariah Indonesia	104.554.949	104.081.432
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	822.105.292	486.198.935
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.508.162.256	1.137.980.220
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	559.772.011	556.899.203
Jumlah Giro pada Bank Pemerintah	5.720.161.079	2.583.839.053
Giro pada Bank Daerah		
PT. Bank Daerah Khusus Ibukota Jakarta	13.120.143	15.060.143
PT. BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	76.624.398	76.624.398
Jumlah Giro pada Bank Daerah	89.744.541	91.684.541
Giro pada Bank Swasta		
PT. Bank Danamon Tbk	411.599.936	543.113.302
PT. Bank Maybank Indonesia Tbk	49.038.812	49.110.016
PT. Bank Mega Tbk	356.646.022.221	968.017.860
PT. Bank Panin Tbk	73.021.407	74.232.598
PT. Bank Muamalat Tbk	30.100.096	30.340.096
PT. Bank CIMB Niaga Tbk	3.083.197	3.173.197
PT. Bank Nationalnobu Tbk	130.949.541	131.171.887
PT. Bank Mayapada Tbk	655.842.596	645.200.019
Jumlah Giro pada Bank Swasta	357.999.657.806	2.444.358.977
Jumlah Giro pada Bank Lain	363.809.563.426	5.119.882.571

Suku bunga efektif rata-rata setahun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar 1%.

Seluruh giro pada bank lain digolongkan lancar. Manajemen berpendapat tidak terdapat indikasi adanya penurunan nilai terhadap Giro Bank Sulteng pada Bank lain.

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN

a. Berdasarkan Jenis dan Jatuh Tempo

	Jatuh Tempo	2022	2021
Call Money Depo Facility	Januari 2023	155.500.000.000	341.900.000.000
Term Deposit	Januari 2023	174.896.422.452	2.149.321.769.575
Call Money	Januari 2023	515.000.000.000	605.000.000.000
DOC dan Deposito Berjangka	Januari 2023	50.000.000.000	50.000.000.000
Jumlah		895.396.422.452	3.146.221.769.575

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN (lanjutan)

b. Berdasarkan Penerbit

	2022	2021
Bank Indonesia (Call Money Depo Facility)	155.500.000.000	341.900.000.000
Bank Indonesia (Term Deposit)	174.896.422.452	2.149.321.769.575
Call Money:		
PT. Bank Victoria	165.000.000.000	-
PT. Bank Sulselbar	-	150.000.000.000
PT. Bank Papua	-	140.000.000.000
PT. Bank Maluku	100.000.000.000	100.000.000.000
PT. Bank Sumsel	75.000.000.000	-
PT. Bank Jambi	75.000.000.000	-
PT. Bank Kalimantan Barat	100.000.000.000	-
PT. Bank Kalimantan Timur	-	50.000.000.000
Jumlah Call money	515.000.000.000	440.000.000.000
Deposit on Call/Deposito Berjangka		
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	-	-
PT. Bank Mega Tbk (pihak berelasi)	50.000.000.000	50.000.000.000
PT. Bank Mayapada	-	-
Jumlah Deposit on Call/Deposito Berjangka	50.000.000.000	50.000.000.000
Jumlah	895.396.422.452	2.981.221.769.575

c. Tingkat Suku Bunga Per Tahun

	2022	2021
Call Money (Fasbi)	4,75%	2,75%
Term Deposit	5,33%	2,84%
Interbank call money	4.97% - 6.00%	2,86% - 3,51%
Deposito berjangka	5,60%	3,30%

Manajemen tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain karena seluruh penempatan tersebut digolongkan lancar.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, tidak terdapat penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang digunakan sebagai jaminan.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK - EFEK

a. Berdasarkan Jenis dan Tujuan

	2022	2021
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo:		
Obligasi	37.000.000.000	33.000.000.000
Negotiable Certificate Deposit	10.000.000.000	50.000.000.000
Surat Utang Negara (Reverse Repo)	1.170.688.197.000	553.138.422.300
Surat Berharga Repo	2.031.944.064.686	910.119.325.097
Diskonto Yang Belum Diamortisasi	(497.917.778)	(2.564.327.554)
Jumlah Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	3.249.134.343.908	1.543.693.419.843
Tersedia untuk Dijual		
Sertifikat Bank Indonesia	-	-
Jumlah Tersedia Untuk Dijual	-	-
Jumlah Efek-Efek	3.249.134.343.908	1.543.693.419.843
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(45.872.130)	(143.713.372)
Jumlah Bersih Efek-Efek	3.249.088.471.778	1.543.549.706.471

b. Berdasarkan Penerbit

	2022	2021
Bank Indonesia		
Reverse Repo	-	231.357.100.000
Jumlah Efek Bank Indonesia	-	231.357.100.000
Bank Lain		
PT. BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	15.000.000.000	15.000.000.000
PT. BPD Jawa Tengah	-	3.000.000.000
PT. Bank Lampung	-	5.000.000.000
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.000.000.000	208.831.552.000
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	558.138.422.300
PT. Bank Negara Indonesia	20.000.000.000	-
PT. Bank Victoria	-	5.000.000.000
PT. BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	-	-
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	-
PT. BPD Nusa Tenggara Timur	10.000.000.000	20.000.000.000
PT. BPD DKI	-	10.000.000.000
PT. BPD BALI	-	20.000.000.000
Diskonto yang Belum Diamortisasi	(497.917.778)	(2.564.327.554)
Jumlah Efek Bank Lain	46.502.082.222	842.405.646.746
Selain Bank		
Pemerintah Republik Indonesia	3.202.632.261.686	469.930.673.097
Jumlah Selain Bank	3.202.632.261.686	469.930.673.097
Jumlah Efek-Efek	3.249.134.343.908	1.543.693.419.843
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(45.872.130)	(143.713.372)
Jumlah Bersih Efek-Efek	3.249.088.471.778	1.543.549.706.471

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK - EFEK (lanjutan)

c. Berdasarkan Jangka Waktu

	2022	2021
Kurang dari 1 Tahun	2.419.658.982.000	1.003.223.035.133
1 Tahun sampai dengan 5 Tahun	220.782.156.212	122.478.711.614
Lebih dari 5 Tahun	608.693.205.696	417.991.673.096
Jumlah	3.249.134.343.908	1.543.693.419.843

d. Berdasarkan Sisa Umur Jatuh Tempo

	2022	2021
Kurang dari 1 Tahun	2.439.161.064.222	1.049.858.172.458
1 Tahun sampai dengan 5 Tahun	333.712.128.631	175.674.393.730
Lebih dari 5 Tahun	476.261.151.055	318.160.853.655
Jumlah	3.249.134.343.908	1.543.693.419.843

e. Peringkat Obligasi

Peringkat obligasi berdasarkan hasil pemeringkatan oleh PT. Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022	2021
PT. BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	idA+	idA+
PT. BPD Jawa Tengah	-	idA+
PT. Bank Lampung	-	idA-
PT. Bank Victoria	-	idA-
PT. Bank Mandiri	-	idAAA
PT. Bank Negara Indonesia	idAAA	-
PT. Bank Rakyat Indonesia	idA-	-
PT. BPD Nusa Tenggara Timur	idA-	-

f. Tingkat Suku Bunga

	2022	2021
Sertifikat Bank Indonesia	-	-
NCD	7,20%	4.25% - 7.20%
Reverse Repo	4.54% - 8.38%	3.01% - 7.55%
Obligasi	6.35% - 8.00%	6.95% - 12.25%
Medium Term Note	-	-

g. Kolektabilitas

Seluruh efek-efek yang dimiliki oleh PT. Bank Sulteng pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 digolongkan dalam kolektabilitas lancar.

Seluruh efek-efek yang dimiliki dalam bentuk mata uang Rupiah.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

8. KREDIT YANG DIBERIKAN

a. Berdasarkan Jenis dan Hubungan dengan Bank

	2022	2021
Pihak Berelasi		
Konsumsi	21.925.681.829	26.011.000.000
Jumlah Kredit Pihak Berelasi	21.925.681.829	26.011.000.000
Pihak Ketiga		
Modal Kerja	548.267.963.216	453.370.080.203
Investasi	324.775.114.760	215.151.295.126
Konsumsi	5.372.482.600.017	4.931.057.334.496
Jumlah Kredit Pihak Ketiga	6.245.525.677.993	5.599.578.709.825
Jumlah Kredit Yang Diberikan	6.267.451.359.822	5.625.589.709.825
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(108.374.916.164)	(96.229.982.598)
Jumlah Bersih	6.159.076.443.658	5.529.359.727.226

Kredit kepada pihak berelasi adalah kredit yang diberikan kepada pihak-pihak yang memenuhi kriteria pihak terkait dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum maupun PSAK 7: Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi.

b. Berdasarkan Kolektabilitas

	2022	
	Nilai Tercatat	CKPN
Lancar	5.990.547.633.569	23.908.374.619
Dalam Perhatian Khusus	83.345.133.748	7.987.748.215
Kurang Lancar	19.817.675.254	6.170.152.554
Diragukan	51.472.974.727	19.892.876.079
Macet	122.267.942.524	50.415.764.697
Jumlah	6.267.451.359.822	108.374.916.164

	2021	
	Nilai Tercatat	CKPN
Lancar	5.456.711.809.227	40.273.278.485
Dalam Perhatian Khusus	93.845.133.836	16.291.348.958
Kurang Lancar	9.047.170.619	4.572.704.082
Diragukan	7.129.747.728	3.788.419.536
Macet	58.855.848.415	31.304.231.537
Jumlah	5.625.589.709.825	96.229.982.598

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

8. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

b. Berdasarkan Sektor Ekonomi

	2022	2021
Pertanian	171.607.865.325	23.292.105.448
Pertambangan	271.066.329.328	101.126.260.708
Perindustrian	8.189.975.412	4.576.499.729
Perdagangan/Restoran & Hotel	201.856.666.320	97.218.839.893
Konstruksi	159.378.428.639	325.595.219.880
Pengangkutan	252.902.125	1.169.102.652
Jasa dunia usaha	61.105.048.643	317.851.195.162
Lain-lain	5.393.994.144.031	4.754.760.486.353
Jumlah	<u>6.267.451.359.822</u>	<u>5.625.589.709.825</u>
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	<u>(108.374.916.164)</u>	<u>(96.229.982.598)</u>
Jumlah Bersih	<u>6.159.076.443.658</u>	<u>5.529.359.727.226</u>

Matriks kredit yang diberikan berdasarkan sektor ekonomi dan kolektabilitas adalah sebagai berikut:

Sektor Ekonomi	2022						
	Lancar	DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	CKPN	Nilai Bersih
Pertanian	166.797.976.806	376.462.422	27.863.954	840.063.842	3.565.498.301	2.755.799.480	168.852.065.845
Pertambangan	264.418.844.855	3.408.807.566	-	-	3.238.676.907	2.931.229.875	268.135.099.453
Perindustrian	2.222.440.180	3.996.394.260	31.682.822	12.998.489	1.926.459.661	2.160.754.591	6.029.220.821
Perdagangan/Restoran & Hotel	145.689.394.744	9.472.653.052	1.316.321.294	7.244.518.163	38.133.779.066	34.800.181.348	167.056.484.972
Konstruksi	104.782.418.529	9.215.291.945	2.642.377.499	24.116.934.228	18.621.406.438	23.019.883.092	136.358.545.547
Pengangkutan	-	-	11.805.528	-	241.096.597	95.316.863	157.585.262
Jasa dunia usaha	46.522.920.806	770.120.204	38.510.877	305.858.747	13.467.638.009	5.596.981.839	55.508.066.804
Lain-lain	5.260.113.637.649	56.105.404.299	15.749.113.280	18.952.601.258	43.073.387.545	37.014.769.076	5.356.979.374.955
Jumlah	<u>5.990.547.633.569</u>	<u>83.345.133.748</u>	<u>19.817.675.254</u>	<u>51.472.974.727</u>	<u>122.267.942.524</u>	<u>108.374.916.164</u>	<u>6.159.076.443.658</u>

Sektor Ekonomi	2021						
	Lancar	DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	CKPN	Nilai Bersih
Pertanian	18.620.190.728	750.853.970	178.020.208	445.595.287	3.297.445.255	4.965.485.399	18.326.620.049
Pertambangan	98.064.965.659	2.484.688.832	-	-	576.606.217	1.187.566.661	99.938.694.047
Perindustrian	2.136.441.959	1.122.672.074	51.459.375	31.481.110	1.234.445.211	857.269.100	3.719.230.629
Perdagangan/Restoran & Hotel	68.900.443.047	13.235.008.255	825.084.836	690.108.192	13.568.195.563	12.023.402.859	85.195.437.034
Konstruksi	287.975.930.348	23.757.667.973	2.756.861.342	269.777.023	10.834.983.194	24.920.981.650	300.674.238.230
Pengangkutan	896.805.541	28.472.214	16.527.763	16.644.442	210.652.692	93.845.598	1.075.257.054
Jasa dunia usaha	300.836.754.519	8.755.181.467	677.230.500	2.500.000	7.579.528.676	19.367.651.610	298.483.543.551
Lain-lain	4.679.280.277.426	43.710.589.051	4.541.986.595	5.673.641.674	21.553.991.608	32.813.779.721	4.721.946.706.632
Jumlah	<u>5.456.711.809.227</u>	<u>93.845.133.836</u>	<u>9.047.170.619</u>	<u>7.129.747.728</u>	<u>58.855.848.415</u>	<u>96.229.982.598</u>	<u>5.529.359.727.226</u>

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

8. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

c. Berdasarkan Jangka Waktu

Berdasarkan Jangka Waktu Perjanjian

	2022	2021
Kurang dari atau sama dengan 1 tahun	241.799.019.713	319.945.310.217
Lebih dari 1 tahun sampai 2 tahun	273.355.938.340	131.488.051.045
Lebih dari 2 tahun sampai 5 tahun	638.424.393.012	485.440.032.323
Lebih dari 5 tahun	5.113.872.008.757	4.688.716.316.239
Jumlah	6.267.451.359.822	5.625.589.709.825
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(108.374.916.164)	(96.229.982.598)
Jumlah Bersih	6.159.076.443.658	5.529.359.727.226

Berdasarkan Sisa Waktu Hingga Jatuh Tempo

	2022	2021
Kurang dari atau sama dengan 1 tahun	328.605.401.302	361.610.039.781
Lebih dari 1 tahun sampai 2 tahun	388.956.834.908	215.938.325.196
Lebih dari 2 tahun sampai 5 tahun	646.660.129.506	539.037.922.671
Lebih dari 5 tahun	4.903.228.994.106	4.509.003.422.177
Jumlah	6.267.451.359.822	5.625.589.709.825
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(108.374.916.164)	(96.229.982.598)
Jumlah Bersih	6.159.076.443.658	5.529.359.727.226

d. Suku Bunga Rata-Rata

Suku bunga rata-rata atas kredit yang diberikan Per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar 8,39% dan 8,75%.

e. Ikhtisar Kredit Bermasalah (NPL) Berdasarkan Sektor Ekonomi

	2022	2021
Pertanian	4.433.426.097	3.921.060.750
Pertambangan	3.238.676.907	576.606.217
Perindustrian	1.971.140.972	1.317.385.696
Perdagangan/Restoran & Hotel	46.694.618.523	15.083.388.591
Konstruksi	45.380.718.165	13.861.621.559
Pengangkutan	252.902.125	243.824.897
Jasa dunia usaha	13.812.007.633	8.259.259.176
Lain-lain	77.775.102.083	31.769.619.876
Jumlah	193.558.592.505	75.032.766.762

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

8. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

f. Perubahan Cadangan Kerugian Piutang

	2022	2021
Saldo awal	96.229.982.598	97.959.947.285
Cadangan kerugian penurunan nilai kolektif: (Pemulihan)/kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan	16.483.383.072	899.098.116
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(4.338.449.506)	(2.629.062.803)
Saldo akhir	108.374.916.164	96.229.982.598

g. Informasi Pokok Lainnya Sehubungan dengan Kredit yang Diberikan

Mulai 1 Januari 2020, perhitungan CKPN dilakukan berdasarkan PSAK 71. Perhitungan CKPN Bank Sulteng berpedoman pada Pedoman SOP penerapan psak 71 PT.Bank Sulteng, sesuai Keputusan Direksi Bank Sulteng No. 93/BPD-ST/KDT/XI/2020 tanggal 2 Desember 2020.

Pada Bulan Januari 2020 Bank Sulteng melakukan penerapan PSAK 71 dan untuk menyerap kenaikan CKPN dampak penerapan awal PSAK 71, Bank menggunakan Cadangan Umum sebesar Rp.31.655.852.657,40 sesuai SK Direksi No.10/SK-DIR/BPD-ST/2020 tanggal 27 Januari 2020 dan Keputusan RUPS-LB No. 33 Tanggal 4 April 2019.

Kredit yang diberikan pada umumnya dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito berjangka atau jaminan lain yang dapat diterima oleh perbankan.

Kredit konsumsi terdiri dari kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor dan kredit perorangan lainnya.

Kredit yang diberikan kepada karyawan bank merupakan kredit untuk membeli rumah, kendaraan dan keperluan lainnya yang dibebani bunga sebesar 7% per tahun dengan jangka waktu kredit berkisar antara 1 (satu) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang dibayar kembali melalui pemotongan gaji setiap bulan dari karyawan yang bersangkutan.

Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera adalah kredit dengan dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang diterbitkan oleh Bank Sulteng kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam rangka pemilikan rumah sejahtera yang dibeli dari pelaku pembangunan. Kredit ini merupakan kerja sama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Bank Sulteng.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, tidak terdapat pelanggaran ataupun pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada pihak ketiga dan pihak berelasi. Bank telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan Bank Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2022, rasio NPL-gross dan rasio NPL-net adalah masing-masing sebesar 3,09% dan 1,87% sedangkan pada posisi 31 Desember 2021, rasio NPL-gross dan rasio NPL-net adalah masing-masing sebesar 1,33% dan 0% yang dihitung berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 /SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.

Pada Tahun 2022 dan 2021, Bank sulteng melakukan penghapusan kredit. Penghapusbukuan kredit tersebut bukan merupakan hapus tagih, sehingga upaya penagihan tetap dilakukan.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

9. ASET TETAP

Keterangan	2022				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Harga Perolehan:					
Tanah	11.861.158.147	-	-	-	11.861.158.147
Bangunan Kantor	63.843.626.735	4.250.280.097	-	-	68.093.906.832
Rumah Dinas	11.267.317.469	-	-	125.460.000	11.141.857.469
Kendaraan	1.211.888.045	-	-	-	1.211.888.045
Mesin Kantor	29.907.215.978	1.025.319.700	-	-	30.932.535.678
Perabot Kantor	38.914.993.679	2.535.362.823	-	-	41.450.356.502
Perabot Rumah Dinas	720.237.622	1.500.000	-	-	721.737.622
Aset Hak Guna	17.491.578.964	11.130.066.892	-	-	28.621.645.856
Jumlah	175.218.016.640	18.942.529.512	-	125.460.000	194.035.086.152
Aset Dalam Penyelesaian	8.066.094.711	-	-	1.526.593.309	6.539.501.402
Jumlah Harga Perolehan	183.284.111.350	18.942.529.512	-	1.652.053.309	200.574.587.553
Akumulasi Penyusutan:					
Bangunan Kantor	(16.125.716.925)	(3.327.556.925)	-	-	(19.453.273.850)
Rumah Dinas	(2.489.320.463)	(920.109.380)	-	-	(3.409.429.843)
Kendaraan	(1.056.377.266)	(79.698.398)	-	-	(1.136.075.664)
Mesin Kantor	(25.256.383.521)	(2.257.602.817)	-	-	(27.513.986.338)
Perabot Kantor	(30.154.876.780)	(3.601.820.288)	-	-	(33.756.697.068)
Perabot Rumah Dinas	(591.301.810)	(59.753.566)	-	-	(651.055.376)
Jumlah Akumulasi Penyusutan	(75.673.976.765)	(10.246.541.374)	-	-	(85.920.518.139)
Nilai Buku Aset Tetap	<u>107.610.134.585</u>				<u>114.654.069.415</u>

Keterangan	2021				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Harga Perolehan:					
Tanah	11.861.158.147	-	-	-	11.861.158.147
Bangunan Kantor	60.858.340.591	2.985.286.144	-	-	63.843.626.735
Rumah Dinas	12.293.827.383	-	-	1.026.509.914	11.267.317.469
Kendaraan	1.089.329.045	122.559.000	-	-	1.211.888.045
Mesin Kantor	27.262.503.877	2.644.712.101	-	-	29.907.215.978
Perabot Kantor	37.208.673.936	1.706.319.743	-	-	38.914.993.679
Perabot Rumah Dinas	656.599.622	63.638.000	-	-	720.237.622
Aset Hak Guna	15.792.483.483	1.699.095.481	-	-	17.491.578.964
Jumlah	167.022.916.085	9.221.610.469	-	1.026.509.914	175.218.016.640
Aset Dalam Penyelesaian	5.269.953.740	6.405.525.215	-	3.609.384.244	8.066.094.711
Jumlah Harga Perolehan	172.292.869.825				183.284.111.350
Akumulasi Penyusutan:					
Bangunan Kantor	(13.925.697.689)	(2.200.019.237)	-	-	(16.125.716.925)
Rumah Dinas	(724.671.631)	(1.764.648.832)	-	-	(2.489.320.463)
Kendaraan	(931.518.847)	(124.858.419)	-	-	(1.056.377.266)
Mesin Kantor	(22.452.214.671)	(2.804.168.850)	-	-	(25.256.383.521)
Perabot Kantor	(25.959.512.290)	(4.195.364.490)	-	-	(30.154.876.780)
Perabot Rumah Dinas	(484.881.407)	(106.420.403)	-	-	(591.301.810)
Jumlah Akumulasi Penyusutan	(64.478.496.534)	(11.195.480.231)	-	-	(75.673.976.765)
Nilai Buku Aset Tetap	<u>107.814.373.290</u>				<u>107.610.134.585</u>

Aset tetap dalam penyelesaian sebesar Rp6.539.501.402 dan Rp8.066.094.711 adalah bangunan kantor dan inventaris dalam penyelesaian yang masih dalam proses pengerjaan per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat indikasi terjadinya penurunan nilai pada aset tetap.

Tidak terdapat Aset Tetap yang dijaminan oleh Bank pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

10. ASET TAK BERWUJUD

Keterangan	2022				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Harga Perolehan					
Aset Tak Berwujud	5.140.647.000	350.835.000	-	-	5.491.482.000
Jumlah	5.140.647.000	350.835.000	-	-	5.491.482.000
Akumulasi Amortisasi					
Aset Tak Berwujud	(2.078.871.900)	(497.866.654)	-	-	(2.576.738.554)
Jumlah	(2.078.871.900)	(497.866.654)	-	-	(2.576.738.554)
Nilai Buku	<u>3.061.775.100</u>				<u>2.914.743.446</u>

Keterangan	2021				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Harga Perolehan					
Aset Tak Berwujud	4.539.420.000	601.227.000	-	-	5.140.647.000
Jumlah	4.539.420.000	601.227.000	-	-	5.140.647.000
Akumulasi Amortisasi					
Aset Tak Berwujud	(1.670.312.166)	(408.559.734)	-	-	(2.078.871.900)
Jumlah	(1.670.312.166)	(408.559.734)	-	-	(2.078.871.900)
Nilai Buku	<u>2.869.107.834</u>				<u>3.061.775.100</u>

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat indikasi adanya penurunan nilai aset tidak berwujud.

11. BEBAN DIBAYAR DIMUKA DAN ASET LAIN-LAIN

	2022	2021
Uang Muka Kepada Pihak Ketiga	2.200.000	21.760.000
Persediaan	6.982.072.463	2.521.203.478
Beban Dibayar Dimuka	5.795.107.461	9.861.164.685
Tagihan ATM Bersama	10.890.183.641	3.234.542.468
Tagihan Link Telkom	28.192.769.009	24.066.023.350
Pendapatan Yang Masih Akan Diterima	56.521.954.343	41.624.811.871
Aset Lainnya	45.500.000	949.528.592
Panjar Uang Muka PPh Pasal 25	1.173.747.520	-
Jumlah	<u>109.603.534.437</u>	<u>82.279.034.444</u>

Penjelasan atas Beban Dibayar Dimuka dan Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

a. Persediaan

	2022	2021
Persediaan Barang Cetak dan Formulir	3.185.806.917	1.161.270.552
Persediaan Alat Tulis Kantor	95.593.887	74.163.704
Persediaan Buku Cek dan Bilyet Giro	1.709.275.591	1.142.092.871
Persediaan Barang Iklan dan Promosi	1.991.396.069	143.676.352
Jumlah	<u>6.982.072.463</u>	<u>2.521.203.478</u>

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

11. BEBAN DIBAYAR DIMUKA DAN ASET LAIN-LAIN (lanjutan)

b. Beban Dibayar di Muka

	2022	2021
Beban Sewa Gedung	4.163.120.166	4.491.650.420
Beban Sewa Mesin-mesin Kantor	633.804.860	464.227.060
Beban Asuransi Aset Tetap	109.389.822	50.906.225
Biaya Program SIMANTAP	888.792.613	4.441.116.277
Biaya Personalia	-	405.464.703
Biaya Inventaris	-	7.800.000
Jumlah	5.795.107.461	9.861.164.685

c. Pendapatan Bunga Yang Masih akan Diterima

	2022	2021
Bunga Kredit	31.801.834.264	30.074.200.796
Bunga Deposito Berjangka	539.197.108	162.927.702
Bunga Deposito on Call	-	-
Bunga Call Money	198.166.667	51.426.389
Lainnya Antar Bank	23.982.756.304	11.336.256.985
Jumlah	56.521.954.343	41.624.811.871

12. LIABILITAS SEGERA

	2022	2021
Kiriman Uang	113.765.827.354	91.675.439.731
Dana Titipan	25.494.050.258	30.008.313.493
Titipan Pajak Penghasilan	1.496.335.216	1.525.260.477
Kewajiban Pada Pihak Ketiga	59.509.567.604	46.516.930.651
Standing Instruction (SI) Gaji	8.941.181.838	39.084.211.127
Standing Instruction (SI) Kredit	638.286.095	412.129.377
Angsuran Asset Sales	343.086.259	395.130.079
Setoran Deposito Jatuh Tempo	12.000.000	411.600.000
Cadangan Remunerasi	383.981.628	311.905.331
Liabilitas Hak Aset Guna	28.621.645.856	17.491.578.964
Kewajiban atas Surat Berharga Repo	1.170.688.197.000	553.138.422.300
Jumlah	1.409.894.159.108	780.970.921.529

Liabilitas segera adalah kewajiban bank kepada pihak lain yang sifatnya segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat atau perjanjian yang ditetapkan sebelumnya.

Liabilitas segera terdiri dari kiriman uang, dana titipan, dana yang sudah jatuh tempo tapi belum diambil nasabah, transaksi kliring, kewajiban pada pihak ketiga dan kewajiban wajib pungut/potong PPh.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

12. LIABILITAS SEGERA (lanjutan)

Rincian atas liabilitas segera adalah sebagai berikut:

a. Kiriman Uang

	2022	2021
Titipan Transfer Pihak Ketiga	48.846.582.893	36.100.192.331
Titipan KU yang akan dibayar	16.149.677.902	8.100.817.601
Titipan KU via RTGS	41.921.634.334	39.415.782.072
Titipan KU via Kliring	6.847.932.225	8.052.291.726
Titipan KU Retur Kliring	-	6.356.000
Jumlah	113.765.827.354	91.675.439.731

b. Dana Titipan

	2022	2021
Titipan pihak ketiga	22.787.742.577	21.440.589.019
Titipan Pihak Ketiga Angsuran Pinjaman	348.820.961	208.893.620
Titipan Penampungan Selisih	107.910	2.966.670.557
Kas Titipan Bank Indonesia	104.090.732	93.662.991
Titipan Setoran Pajak Pihak III	225.977.852	2.509.608.956
Titipan Provisi Kredit dalam proses	3.000.000	3.000.000
Titipan antar Biro/Seksi Bank Sulteng	2.024.310.226	2.785.888.351
Jumlah	25.494.050.258	30.008.313.493

c. Titipan Pajak Penghasilan

	2022	2021
Titipan PPh Bunga Tabungan	259.755.322	451.017.513
Titipan PPh Bunga Deposito Berjangka	843.192.183	898.314.443
Titipan PPh Jasa Giro	30.652.564	31.392.109
Titipan PPh Pasal 21/23	153.568.603	89.461.210
Titipan PPn	209.166.544	55.075.202
Jumlah	1.496.335.216	1.525.260.477

d. Kewajiban Pada Pihak Ketiga

	2022	2021
Kewajiban ATM Bersama	37.353.724.944	25.685.143.716
Pelimpahan ATM Bersama	981.679.814	2.259.501.862
Kewajiban Link - Telkom	19.856.766.637	18.254.133.794
Kewajiban PLN	57.322.090	48.712.663
Kewajiban Tiket Pesawat	6.097.300	1.342.700
Kewajiban Payment Telkomsel	317.491.175	206.423.944
Kewajiban BPD Net Online	2.632.000	2.632.000
Kewajiban Biller ATM	38.721.900	32.184.102
Titipan Kewajiban Fee Samolnas	-	30.500
Multibiler Emobile	58.666.320	26.781.290
Titipan Kewajiban Qris	-	38.292
Titipan Fee admin Digital Ekosistem	6.266.848	5.788
Kewajiban Artajasa Digital Ekosistem	829.975.575	-
Penampungan Transaksi Gagal Digital Ekosistem	223.000	-
Jumlah	59.509.567.604	46.516.930.651

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

13. SIMPANAN NASABAH

a. Berdasarkan jenis

	2022	2021
Pihak Berelasi:		
Giro	576.821.007.499	377.663.955.552
Tabungan		-
- Simantap	615.113.019	1.437.843.876
- Simpeda	353.428.608	615.286.933
- PNS	561.151.870	54.084.098
- Tabunganku	8.464.268	8.454.734
- Tabungan Siswa plus	24.150.000	15.387.131
- Siswa Plus	-	22.400.000
- Tabungan Simantap 3 In 1	1.070.467.848	-
Jumlah Pihak Berelasi	579.453.783.112	379.817.412.325
Pihak Ketiga:		
Giro	1.998.955.872.778	1.868.128.812.087
Tabungan		
- Simantap	81.537.115.731	66.634.877.563
- Tabungan Lokal	9.029.311	2.860.278
- Simpeda	662.015.227.985	623.529.409.931
- Tabunganku	129.407.368.958	100.907.471.285
- Tabungan PNS	547.172.618.993	522.089.230.578
- Tabungan Pensiunku	15.134.839.521	12.635.204.844
- TabunganKU Plus	41.290.796.688	39.407.414.428
- Tabungan Siswa	28.393.062.928	24.243.012.501
- Tabungan Siswa plus	12.144.909.545	9.423.551.326
- Tabungan Simpel	6.514.295.120	6.419.261.507
- Tabungan Simantap 3 In 1	269.293.725.327	205.198.545.963
Deposito	3.773.751.771.126	4.121.095.712.334
Jumlah Pihak Ketiga	7.565.620.634.009	7.599.715.364.623
Jumlah Simpanan	8.145.074.417.121	7.979.532.776.948

b. Deposito berjangka berdasarkan jangka waktu

	2022	2021
Deposito Berjangka:		
- 1 bulan	773.577.843.707	814.101.773.933
- 3 bulan	979.414.914.500	1.588.269.214.500
- 6 bulan	25.402.725.000	357.419.725.000
- 12 bulan	1.995.356.287.919	1.361.304.998.901
Jumlah	3.773.751.771.126	4.121.095.712.334

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

13. SIMPANAN NASABAH (lanjutan)

c. Deposito berjangka berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo

	2022	2021
Deposito Berjangka:		
- 1 bulan	1.192.078.992.932	937.294.923.158
- 3 bulan	546.661.620.078	1.511.696.261.698
- 6 bulan	33.157.043.224	1.359.629.846.076
- 12 bulan	2.001.854.114.892	312.474.681.402
Jumlah	<u>3.773.751.771.126</u>	<u>4.121.095.712.334</u>

d. Tingkat Suku Bunga

	2022	2021
Giro	0,35% - 2,40%	0,35% - 2,40%
Tabungan	0,00% - 2,50%	0,00% - 2,50%
Deposito	0,00% - 6,80%	1,00% - 7,00%

Simpeda adalah produk tabungan dari Bank Pembangunan Daerah yang memberikan jasa bunga yang dihitung dari saldo rata-rata harian dengan memberikan hadiah yang diundi secara nasional.

Simantap adalah produk tabungan khusus dari PT Bank Sulteng dengan memberikan jasa bunga yang dihitung dari saldo rata-rata harian namun tidak menawarkan hadiah.

TabunganKu adalah produk tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan antara lain tanpa biaya administrasi yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2014 Bank Sulteng mengeluarkan produk baru yaitu Tabungan Siswa dan Tabungan Siswa Plus. Tabungan ini merupakan produk turunan dari TabunganKu yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, yang dikembangkan lagi oleh Bank Sulteng. Tabungan Siswa Plus ini memiliki jangka waktu minimal 2 tahun.

PT Bank Sulteng mengeluarkan produk baru untuk jenis tabungan yang dituangkan dalam Memo No. 02/BPD-ST/DIR/XV-A/2011 tanggal 14 Januari 2011 perihal Mandatory Produk Tabungan PNS dan PensiunKu.

Tabungan PNS adalah produk tabungan untuk perorangan yang disyaratkan hanya kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Propinsi/Kota/Kabupaten se-Sulawesi Tengah.

Tabungan PensiunKu adalah produk tabungan untuk perorangan yang disyaratkan hanya kepada Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pejabat Negara, Hakim, Pensiun PNS Ex Pengadilan, Pensiun PNS Ex Departemen Perhubungan pada PT KAI, TNI dan Polri, serta Penerima Tunjangan Veteran, Dana Kehormatan Veteran PKRI dan KNIP.

Pada tahun 2015 Bank Sulteng mengeluarkan produk baru yaitu Tabungan Simpel. Tabungan SimPel adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

Pada tahun 2016 Bank Sulteng mengeluarkan program baru yaitu Tabungan Simantap 3 in 1. Tabungan Simantap 3 in 1 merupakan program yang dikeluarkan oleh Bank Sulteng dengan memberikan 3 manfaat dalam 1 rekening, dimana nasabah menerima 3 manfaat (rate, cash back, gift).

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

14. SIMPANAN BANK LAIN

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Call Money	850.000.000.000	825.000.000.000
Jumlah	<u>850.000.000.000</u>	<u>825.000.000.000</u>
Call money pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 memiliki masa jatuh tempo kurang dari satu bulan.		
Tingkat suku bunga:	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Giro	-	-
Call Money	5.70% - 6.10%	2,95% - 3,52%

Tidak terdapat simpanan dari bank lain yang diblokir atau dijadikan jaminan atas pinjaman yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

15. PINJAMAN YANG DITERIMA

Pinjaman yang diterima oleh PT. Bank Sulteng adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Kementerian PU dan Perumahan Rakyat RI	75.013.098.643	67.998.512.380
Jumlah	<u>75.013.098.643</u>	<u>67.998.512.380</u>

Pinjaman Fasilitas Liquiditas Pembiayaan Perumahan (PFLPP) adalah fasilitas liquiditas pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pinjaman tersebut diperoleh dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dengan PT Bank Sulteng Nomor 30/PKS/BP-TPR/II/1/2022 dan Nomor 099/BPD-ST/DIR/KDT/2022 tanggal 6 Januari 2022 tentang Penyaluran dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan melalui kredit pemilikan rumah sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan jangka waktu Perjanjian Kerjasama selama 1 (satu) Tahun terhitung dari tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Kewajiban penysetoran pokok kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan jangka waktu kredit kepada debitur. Pembayaran bunga dilakukan setiap bulan sebesar 0,5%.

16. PAJAK PENGHASILAN

a. Kewajiban Pajak

Saldo kewajiban pajak penghasilan Per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Pajak Penghasilan Kini	67.423.271.960	59.958.551.400
Angsuran Pajak Penghasilan (Pasal 25)	(66.729.293.400)	(53.569.343.960)
Jumlah	<u>693.978.560</u>	<u>6.389.207.440</u>

b. Taksiran Pajak Penghasilan

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Beban Pajak Kini	67.423.271.960	60.006.463.880
Beban/(Manfaat) Pajak Tangguhan	6.871.114.800	8.521.448.372
Jumlah	<u>74.294.386.760</u>	<u>68.527.912.252</u>

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

16. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

b. Taksiran Pajak Penghasilan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan kena pajak Bank untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	320.679.798.577	273.489.492.069
Koreksi Fiskal:		
Perbedaan temporer		
Beban Jasa Produksi tahun 2022 dan 2021	-	21.123.545.209
Beban Tantiem tahun 2022 dan 2021	-	7.682.289.167
Beban Dana Kesejahteraan tahun 2022 dan 2021	-	-
Pembayaran JasPro tahun 2021 dan 2020	(21.123.545.209)	(27.661.528.359)
Pembayaran Tantiem tahun 2021 dan 2020	(7.682.289.167)	(11.986.662.289)
Pembayaran Dana Kesejahteraan 2021 dan 2020	-	-
Beban Manfaat Karyawan Menurut Aktuaris	34.418.059.591	12.646.350.075
Pembayaran Iuran Manfaat Karyawan	(10.842.881.604)	(7.321.343.004)
CKPN	(31.601.740.536)	(19.902.292.416)
Jumlah Beda Temporer	(36.832.396.925)	(25.419.641.618)
Perbedaan Tetap		
Beban Penyusutan Rumah Dinas	920.109.380	1.767.512.075
Beban Sewa Rumah Dinas Direksi	-	3.850.000
Beban Sewa Rumah Dinas Pemimpin Cabang	568.013.118	552.548.141
Beban Sewa Kendaraan	1.733.110.284	1.534.136.814
Beban Pemeliharaan Rumah Dinas	11.322.000	20.526.000
Beban Pembinaan Pegawai dan Keluarga	298.169.150	100.222.050
Beban Langganan Surat Kabar dan Majalah	97.100.000	128.015.000
Beban Perjamuan Tamu	1.046.735.371	787.803.353
Beban Rekreasi dan Olah raga	591.224.000	603.125.528
Beban Bantuan kepada Pegawai	512.264.026	890.390.682
Beban Hadiah dan Sumbangan	1.841.296.270	1.504.230.246
Beban Denda Pajak	-	37.904.572
Beban jamuan kepada pegawai	1.844.631.068	4.157.927.018
Beban perayaan HUT	421.078.250	580.394.891
Beban tunjangan PPh Karyawan	11.267.127.898	10.008.749.857
Beban perawatan kesehatan	1.353.542.747	1.622.017.771
Beban Non Operasional Lainnya	116.292.978	169.665.800
Jumlah Beda Tetap	22.622.016.541	24.469.019.798
Jumlah Koreksi Fiskal	(14.210.380.384)	(950.621.820)
Laba Kena Pajak	306.469.418.192	272.756.654.821
Laba Kena Pajak (Dibulatkan)	306.469.418.000	272.756.654.000

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

16. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

b. Taksiran Pajak Penghasilan (lanjutan)

	2022	2021
Laba Kena Pajak (Dibulatkan)	306.469.418.000	272.756.654.000
Perhitungan Pajak Penghasilan Kini		
Tahun 2022: 22% X Rp 306.469.418.000	67.423.271.960	
Tahun 2021: 22% X Rp 272.756.654.000		59.958.551.400
Pajak Penghasilan Kini	67.423.271.960	59.958.551.400
Uang Muka Pajak (PPH Pasal 25)	(66.729.293.400)	(53.569.343.960)
Kurang/(Lebih) Bayar Pajak	693.978.560	6.389.207.440

Sesuai ketentuan perpajakan di Indonesia, Bank menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang (self-assesment system). Perhitungan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dapat berbeda dan dapat menimbulkan perubahan terhadap jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar. Perubahan jumlah kewajiban pajak akibat perhitungan kembali oleh DJP tersebut akan disesuaikan pada laporan keuangan tahun berjalan dimana perhitungan dilakukan.

c. Pajak Tangguhan

Komponen Aset/(Kewajiban) Pajak Tangguhan

	2022			2022
	2021	Dikreditkan/ (Dibebankan) ke OCI	Dikreditkan/ (Dibebankan) ke Laporan Laba Rugi	
Jasa Produksi dan Tantiem	6.337.063.563	-	(6.337.063.563)	-
Imbalan Pasca Kerja	10.505.109.789	1.563.586.329	(2.160.837.863)	9.907.858.256
CKPN	(5.897.581.813)	-	1.626.786.626	(4.270.795.187)
Jumlah	10.944.591.540	1.563.586.329	(6.871.114.800)	5.637.063.069

Komponen Aset/(Kewajiban) Pajak Tangguhan

	2021			2021
	2020	Dikreditkan/ (Dibebankan) ke OCI	Dikreditkan/ (Dibebankan) ke Laporan Laba Rugi	
Jasa Produksi dan Tantiem	8.722.601.943	-	(2.385.538.380)	6.337.063.563
Imbalan Pasca Kerja	10.940.470.110	604.196.535	(1.039.556.855)	10.505.109.789
CKPN	(801.228.675)	-	(5.096.353.137)	(5.897.581.813)
Jumlah	18.861.843.377	604.196.535	(8.521.448.372)	10.944.591.540

Aset pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

Manajemen berpendapat bahwa terdapat kemungkinan besar jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer yang menimbulkan aset pajak tangguhan tersebut.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

17. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR DAN LIABILITAS LAIN-LAIN

Liabilitas lain-lain adalah liabilitas yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam klasifikasi-klasifikasi akun liabilitas di atas, dengan rincian sebagai berikut:

	2022	2021
Jaminan Tender	1.320.649.774	1.320.649.774
Bunga Yang Masih Harus Dibayar	11.092.098.815	6.470.760.363
Jasa Produksi, Dana Kesejahteraan, dan Tantiem	-	28.804.834.378
CKPN Rekening Administratif (Longgar Tarik)	2.209.041.471	1.691.636.877
Lain lain	3.821.487.607	3.973.656.117
Jumlah	18.443.277.667	42.261.537.509

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

18. PERMODALAN

a. Modal Dasar

Pada Tahun 2014 Modal Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah adalah sebesar Rp490.542.400.000 yang ditetapkan berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah No.05 Tanggal 27 April 2011 yang dibuat oleh Notaris Idayanti Panda, SH, M.Kn. dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-31166.AH.01.02 Tahun 2011 tanggal 21 Juni 2011 dengan nilai nominal Rp100.000 per saham.

Pada Tahun 2015 Modal Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah adalah sebesar Rp650.000.000.000 yang ditetapkan berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah No.85 Tanggal 29 Mei 2015 yang dibuat oleh Notaris Charles, SH, M.Kn. dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-0936834.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 29 Mei 2015 dengan nilai nominal Rp100.000 per saham.

Pada Tahun 2017 Modal Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah adalah sebesar Rp1.000.000.000.000 yang ditetapkan berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah No.14 Tanggal 12 April 2017 yang dibuat oleh Notaris Charles, SH, M.Kn. dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0131326 Tahun 2017 tanggal 12 April 2017 dengan nilai nominal Rp100.000 per saham.

Pada Tahun 2020 Modal Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah adalah sebesar Rp1.700.000.000.000 yang ditetapkan berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah No.39 Tanggal 13 Mei 2020 yang dibuat oleh Notaris Baso Mappatoba, SH, M.Kn. dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-0036281.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 18 Mei 2020 dengan nilai nominal Rp100.000 per saham.

Berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-302/KO.0602/2020 tanggal 10 Juni 2020 perihal Laporan Perubahan Komposisi Kepemilikan Bank Sulteng, komposisi kepemilikan Bank Per Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp426.990.000.000.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka komposisi pemegang saham PT. BPD Sulteng untuk tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022		
	Lembar Saham	%	Nominal Saham
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	1.507.448	35,30%	150.744.800.000
Pemerintah Kota Palu	113.107	2,65%	11.310.700.000
Pemerintah Kabupaten Donggala	143.244	3,35%	14.324.400.000
Pemerintah Kabupaten Poso	171.897	4,03%	17.189.700.000
Pemerintah Kabupaten Banggai	165.048	3,87%	16.504.800.000
Pemerintah Kabupaten Tolitoli	181.943	4,26%	18.194.300.000
Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una	120.320	2,82%	12.032.000.000
Pemerintah Kabupaten Buol	148.407	3,48%	14.840.700.000
Pemerintah Kabupaten Morowali	99.989	2,34%	9.998.900.000
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong	211.085	4,94%	21.108.500.000
Pemerintah Kabupaten Sigi	47.784	1,12%	4.778.400.000
Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan	121.495	2,85%	12.149.500.000
Pemerintah Kabupaten Morowali Utara	111.611	2,61%	11.161.100.000
Pemerintah Kabupaten Banggai Laut	63.106	1,48%	6.310.600.000
PT. Mega Corpora	1.063.416	24,90%	106.341.600.000
Jumlah	4.269.900	100,00%	426.990.000.000

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

18. PERMODALAN (lanjutan)

a. Modal Dasar (lanjutan)

	2021		
	Lembar Saham	%	Nominal Saham
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	1.507.448	35,30%	150.744.800.000
Pemerintah Kota Palu	113.107	2,65%	11.310.700.000
Pemerintah Kabupaten Donggala	143.244	3,35%	14.324.400.000
Pemerintah Kabupaten Poso	171.897	4,03%	17.189.700.000
Pemerintah Kabupaten Banggai	165.048	3,87%	16.504.800.000
Pemerintah Kabupaten Tolitoli	181.943	4,26%	18.194.300.000
Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una	120.320	2,82%	12.032.000.000
Pemerintah Kabupaten Buol	148.407	3,48%	14.840.700.000
Pemerintah Kabupaten Morowali	99.989	2,34%	9.998.900.000
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong	211.085	4,94%	21.108.500.000
Pemerintah Kabupaten Sigi	47.784	1,12%	4.778.400.000
Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan	121.495	2,85%	12.149.500.000
Pemerintah Kabupaten Morowali Utara	111.611	2,61%	11.161.100.000
Pemerintah Kabupaten Banggai Laut	63.106	1,48%	6.310.600.000
PT. Mega Corpora	1.063.416	24,90%	106.341.600.000
Jumlah	4.269.900	100,00%	426.990.000.000

c. Dana Setoran Modal

Dana Setoran Modal merupakan tambahan setoran modal oleh para pemegang saham untuk menambah kepemilikan saham, namun belum didukung kelengkapan persyaratan modal sehingga harus dicatat pada rekening dana setoran modal sesuai pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2016 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

Saldo Dana Setoran Modal per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	608.412	608.412
Pemerintah Kota Palu	2.000.127.887	2.000.127.887
Pemerintah Kabupaten Donggala	4.000.214.756	2.000.214.756
Pemerintah Kabupaten Poso	434.112	434.112
Pemerintah Kabupaten Banggai	4.000.555.471	2.000.555.471
Pemerintah Kabupaten Tolitoli	6.430.804.163	404.660
Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una	4.000.194.389	2.000.194.389
Pemerintah Kabupaten Buol	351.709	351.709
Pemerintah Kabupaten Morowali	7.000.295.000	3.500.295.000
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong	265.985	265.985
Pemerintah Kabupaten Sigi	3.005.080.144	2.000.295.750
Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan	7.080.285.795	4.720.285.795
Pemerintah Kabupaten Morowali Utara	1.750.430.514	430.514
Pemerintah Kabupaten Banggai Laut	4.000.286.346	2.000.286.346
PT. Mega Corpora	20.078.498.349	13.307.386.820
Jumlah	63.348.433.033	33.532.137.607

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

18. PERMODALAN (lanjutan)

c. Dana Setoran Modal (lanjutan)

Dana setoran modal tahun 2021 dan 2022 sebesar Rp63.348.433.033 berasal dari setoran modal Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Wilayah Sulawesi Tengah serta PT.Mega Corpora yang terdiri dari Rp48.728.897.852 belum mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan sebesar Rp14.614.784.394 belum mendapatkan persetujuan RUPS dan Otoritas Jasa Keuangan.

d. Agio

Per 31 Desember 2022 Agio saham yang berasal dari setoran modal Pemprov, Pemkot dan Pemkab di Wilayah Sulawesi Tengah adalah sebesar Rp102.748.707.580, sedangkan agio saham PT. Mega Corpora sebesar Rp62.166.235.944.

Per 31 Desember 2021 Agio saham yang berasal dari setoran modal Pemprov, Pemkot dan Pemkab di Wilayah Sulawesi Tengah adalah sebesar Rp102.748.707.580, sedangkan agio saham PT. Mega Corpora sebesar Rp62.166.235.944.

Rincian saldo agio Per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	45.194.945.195	45.194.945.195
Pemerintah Kota Palu	3.689.172.113	3.689.172.113
Pemerintah Kabupaten Donggala	2.347.713.440	2.347.713.440
Pemerintah Kabupaten Poso	5.426.865.888	5.426.865.888
Pemerintah Kabupaten Banggai	4.242.428.089	4.242.428.089
Pemerintah Kabupaten Tolitoli	5.374.895.837	5.374.895.837
Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una	2.213.491.576	2.213.491.576
Pemerintah Kabupaten Buol	5.158.948.291	5.158.948.291
Pemerintah Kabupaten Morowali	2.028.994.972	2.028.994.972
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong	8.890.737.015	8.890.737.015
Pemerintah Kabupaten Sigi	1.916.519.856	1.916.519.856
Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan	6.050.214.205	6.050.214.205
Pemerintah Kabupaten Morowali Utara	6.524.667.449	6.524.667.449
Pemerintah Kabupaten Banggai Laut	3.689.113.654	3.689.113.654
PT. Mega Corpora	62.166.235.944	62.166.235.944
Jumlah	<u>164.914.943.524</u>	<u>164.914.943.524</u>

Harga saham atas Dana setoran modal Pemegang Saham Tahun 2013 sampai saat ini adalah sebesar Rp158.459 per lembar saham dengan rincian Rp100.000 dibukukan sebagai Nominal saham dan Rp58.459 dibukukan sebagai Agio saham berdasarkan hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik "Miduk Totok" yang telah diputuskan pada RUPS-LB tanggal 12 April 2013 dan tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT. Bank Pembangunan Daerah Sulteng No.69 tanggal 21 Juni 2013.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

19. PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA

	2022	2021
Keuntungan (Kerugian) Nilai Wajar Surat Berharga		
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial Program Manfaat Pasti	21.440.410.837	12.769.613.920
Jumlah	21.440.410.837	12.769.613.920

a. Keuntungan (Kerugian) nilai wajar surat berharga

Merupakan hasil Market to Market atas Nilai Aktiva Bersih (NAB) Surat berharga (Reksadana) dihitung berdasarkan nilai pasar wajar (NPW).

b. Keuntungan (Kerugian) Aktuarial Program Manfaat Pasti

Keuntungan atau kerugian aktuarial dari penyesuaian dan perubahan asumsi aktuarial sebagai kelebihan atas nilai yang lebih tinggi antara 10% dari nilai wajar aset program atau 10% dari nilai kini liabilitas imbalan pasti pada awal periode diamortisasi dan diakui sebagai biaya atau keuntungan selama perkiraan rata rata sisa tahun jasa pegawai yang telah memenuhi kriteria.

20. PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pembagian laba tahun buku 2021 dilaksanakan pada tahun 2022 berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat RUPS LB nomor 20 tanggal 11 Maret 2022. Sedangkan pembagian laba tahun buku 2020 dilaksanakan pada tahun 2021 berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham nomor 88 tanggal 09 Maret 2021.

Adapun alokasi pembagian laba untuk tahun-tahun tersebut adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Dividen	102.504.746.149	92.205.094.531
Cadangan Umum	102.504.746.148	92.205.094.532
Cadangan Tujuan	-	-
Jumlah Alokasi Laba	205.009.492.297	184.410.189.063

21. PENDAPATAN BUNGA

	2022	2021
Penempatan pada Bank Indonesia	166.442.719.178	79.445.360.534
Penempatan pada Bank Lain	24.824.813.252	39.549.099.727
Kredit Yang Diberikan	684.401.280.133	625.280.132.767
Jumlah	875.668.812.563	744.274.593.028

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

22. BEBAN BUNGA

	2022	2021
Bank Indonesia		
- Lending Facility Bank Indonesia	-	23.392.165
Jumlah Beban Bunga Bank Indonesia	-	23.392.165
Bank Lain		
- Call Money	43.480.276.250	19.887.669.723
- Deposito Berjangka	-	472.235
- Giro	1.227.367	-
- Lainnya	18.493.470.914	836.754.994
Jumlah Beban Bunga Bank Lain	61.974.974.530	20.724.896.952
Non Bank		
- Giro	41.136.679.616	33.961.323.746
- Tabungan	19.898.677.696	21.376.575.500
- Deposito Berjangka	136.164.112.266	138.111.266.466
- Lainnya	347.931.266	261.889.876
Jumlah Beban Bunga Non Bank	197.547.400.844	193.711.055.588
Jumlah	259.522.375.375	214.459.344.705

23. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

	2022	2021
Penerimaan bunga kredit hapus buku	-	10.260.616
Penerimaan pokok kredit hapus buku	788.154.643	1.811.346.452
Provisi Bank Garansi	676.268.596	1.024.648.790
Denda kredit dan deposito	11.824.137.545	8.124.733.003
Jasa penggantian Cek dan Bilyet Giro	492.989.567	490.160.230
Jasa administrasi	34.722.257.603	35.561.230.028
Jasa administrasi referensi/dukungan bank	4.139.770	11.300.000
Jasa transfer	515.785.005	487.606.587
Pendapatan Fee	23.142.515.009	29.531.355.642
Keuntungan dari penjualan efek-efek	-	-
Lainnya	1.089.642.787	1.829.314.240
Jumlah	73.255.890.526	78.881.955.588

24. PENYISIHAN (PEMULIHAN) CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI

	2022	2021
Kredit yang diberikan	16.483.383.072	899.098.116
Penempatan pada Bank Lain	-	-
Jumlah	16.483.383.072	899.098.116

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

25. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM

	2022	2021
Beban barang dan jasa pihak ketiga	69.460.806.483	55.315.426.644
Beban sewa	3.881.065.363	13.508.698.531
Beban asuransi	21.024.764.447	16.462.955.573
Beban pemeliharaan dan perbaikan	2.801.962.023	2.317.333.772
Beban penyusutan dan amortisasi	19.754.421.655	12.280.875.300
Beban promosi	9.340.259.543	3.660.325.771
Beban perjalanan dinas	8.379.796.056	9.259.071.665
Beban pajak dan retribusi	180.578.859	154.614.193
Jumlah	<u>134.823.654.428</u>	<u>112.959.301.450</u>

26. BEBAN TENAGA KERJA

	2022	2021
Gaji dan tunjangan	62.316.920.291	67.498.913.230
Honorarium Dewan Komisaris	4.981.474.768	7.169.465.560
Lembur	848.954.060	1.122.708.525
Pembayaran lainnya ke pegawai	89.693.340.222	65.754.327.811
Jasa produksi dan kesejahteraan	-	28.805.834.376
Imbalan kerja	20.014.250.132	17.706.030.961
Pendidikan dan seminar	14.287.620.370	5.982.269.311
Jumlah	<u>192.142.559.843</u>	<u>194.039.549.773</u>

27. BEBAN LAINNYA

	2022	2021
Tenaga ahli	2.533.776.270	1.091.058.505
Beban iuran dana pensiun	769.099.715	887.070.762
Beban operasional lainnya	24.037.703.284	26.983.529.388
Beban dari bank lain	551.746.185	348.925.845
Jumlah	<u>27.892.325.453</u>	<u>29.310.584.500</u>

28. PENDAPATAN/(BEBAN) NON OPERASIONAL

	2022	2021
Pendapatan Non Operasional:		
Pendapatan Non Operasional Lainnya	4.661.098.034	3.802.039.385
Jumlah	<u>4.661.098.034</u>	<u>3.802.039.385</u>
Beban Non Operasional:		
Beban Non Operasional Lainnya	(116.292.978)	(169.665.800)
Denda Laporan	(21.000.000)	(87.000.000)
Denda Pajak	-	(37.904.572)
Denda Lainnya	(63.115.126)	(2.416.768)
Hadiah dan Sumbangan	(1.841.296.270)	(1.504.230.246)
Jumlah	<u>(2.041.704.374)</u>	<u>(1.801.217.386)</u>
Jumlah Pendapatan/(beban) Non Operasional	<u>2.619.393.660</u>	<u>2.000.821.998</u>

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

29. TAGIHAN DAN LIABILITAS KOMITMEN KONTIJENSI

	2022	2021
KOMITMEN		
Tagihan komitmen:		
- Komitmen Kredit yang Belum Digunakan	-	-
- Lainnya	-	-
Jumlah		
Liabilitas komitmen:		
- Komitmen Kredit yang Belum Ditarik	(59.644.227.145)	(56.414.169.653)
- Lainnya	-	-
Jumlah	(59.644.227.145)	(56.414.169.653)
Komitmen bersih	(59.644.227.145)	(56.414.169.653)
KONTIJENSI		
Tagihan Kontijensi:		
- Pendapatan Bunga dalam Penyelesaian	21.713.301.529	14.421.716.054
- Lainnya	-	-
Jumlah	21.713.301.529	14.421.716.054
Liabilitas Kontijensi:		
- Garansi yang Diterbitkan	(14.041.927.727)	(29.588.408.424)
- Lainnya	-	-
Jumlah	(14.041.927.727)	(29.588.408.424)
Kontijensi Bersih	7.671.373.802	(15.166.692.370)
LAINNYA		
- Aset Produktif yang Dihapusbukukan	59.217.086.908	56.191.649.868
- Lainnya	2.533.178.482	4.271.483.198
Jumlah Tagihan Lainnya	61.750.265.390	60.463.133.066
Jumlah Tagihan Komitmen dan Kontijensi - Bersih	9.777.412.047	(11.117.728.957)

30. IMBALAN PASCA KERJA

Bank memberikan imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja lainnya kepada para karyawannya yang memenuhi syarat yang terdiri dari program pensiun manfaat pasti, tunjangan hari tua, penghargaan masa kerja, uang duka dan penghargaan pensiun, serta penghargaan akhir masa jabatan direksi, yang dihitung berdasarkan Peraturan Perusahaan yang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perubahannya.

Penilaian akutaria atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja dihitung oleh akutaria independen (Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto) dengan menggunakan metode projected unit credit. Perhitungan aktuaria untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, diperoleh dari laporan aktuaria tanggal 10 Februari 2022.

	2022	2021
Dana Pensiun	-	-
Tunjangan Hari Tua	19.693.177.702	21.757.533.956
Penghargaan Masa Kerja, Uang Duka dan Pensiun	22.861.689.544	22.332.146.551
Akhir Masa Jabatan Direksi dan Komisaris	2.480.852.099	2.354.156.257
Liabilitas Imbalan Pascar Kerja	45.035.719.345	46.443.836.764

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

30. IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

a. Program Dana Pensiun

PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah memiliki program pensiun manfaat pasti melalui Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah yang pesertanya meliputi setiap karyawan yang telah berusia 18 tahun atau telah menikah. Program tersebut memberikan manfaat pensiun yang akan dibayarkan kepada karyawan yang berhak pada saat karyawan pensiun atau pada saat karyawan tersebut berhenti sesuai dengan peraturan dana pensiun yang bersangkutan.

Pendanaan program pensiun ini dibentuk dari iuran peserta sebesar 5,00% dan iuran normal dan tambahan sesuai dengan perhitungan aktuarial yang dibayarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah sebagai pendiri. Di samping itu, sumber pendanaan lainnya adalah hasil investasi Dana Pensiun. Aset Investasi dana pensiun berupa deposito berjangka.

Berdasarkan laporan aktuaris No 094-D/PSAK/KKA-AS/II/2023 tanggal 25 Januari 2023 untuk perhitungan Dana Pensiun. Beban (Pendapatan) Imbalan Pasca kerja untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Biaya Jasa kini	4.739.743.396	5.059.680.886
Biaya (Pendapatan) Netto		
a. Biaya Bunga	5.902.767.631	5.376.903.548
b. Pendapatan Bunga dari Aset	(6.322.012.367)	(5.537.997.810)
c. Bunga atas dampak batasan aset	419.244.737	161.094.263
Beban (Pendapatan) yang Diakui	4.739.743.397	5.059.680.887
 Rekonsiliasi Pendanaan:		
Nilai Kini Kewajiban	(90.934.098.814)	(78.703.568.409)
Nilai Wajar Aset	91.248.039.246	84.293.498.233
Status Pendanaan	313.940.432	5.589.929.824
Kewajiban transisi yang belum diakui		-
Biaya Jasa Lalu yang belum diakui		-
(Laba)/Rugi Aktuarial yang belum diakui		-
Biaya Dibayar Dimuka (Cadangan) yang diakui akhir periode	313.940.432	5.589.929.824
Perubahan atas Dampak Batasan Aset	(5.275.989.392)	3.352.509.509
 Rekonsiliasi Biaya Dibayar Dimuka (Cadangan) Kewajiban Imbalan Pasca Kerja:		
Biaya Dibayar Dimuka (Cadangan) awal	5.589.929.824	2.237.420.315
Pembayaran Imbalan		
Beban (Pendapatan)	4.739.743.397	5.059.680.886
Pendapatan Komprehensif Lain	6.244.131.169	(3.299.073.990)
Iuran Pemberi Kerja	5.707.885.174	5.113.116.405
Biaya Dibayar Dimuka (Cadangan) Akhir Periode)	313.940.432	5.589.929.824
 Jumlah yang Diakui dalam Laporan Posisi Keuangan		
Liabilitas		
Aset Sebelum Batasan Aset	313.940.432	5.589.929.824
Nilai kini pengembalian masa depan dan pengurangan iuran		
Aset Setelah Batasan Aset	313.940.432	5.589.929.824

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

30. IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

a. Program Dana Pensiun (lanjutan)

Akumulasi (Laba)/Rugi Aktuarial yang Diakui dalam Pendapatan Komprehensif Lain:

	2022	2021
Pendapatan Komprehensif Lain Awal	6.225.865.415	6.172.429.896
(Laba)/Rugi Aktuarial pada Kewajiban	3.886.023.560	(3.577.853.750)
(Laba)/Rugi Aktuarial pada Aset	2.777.352.346	439.874.023
Perubahan dampak batas aset	(5.695.234.129)	3.191.415.246
Pendapatan Komprehensif Lain Akhir Periode	<u>7.194.007.192</u>	<u>6.225.865.415</u>

b. Program Tunjangan Hari Tua Pegawai dan Direksi

Berdasarkan laporan aktuaris Nomor 094-B/PSAK/KKA-AS//2023 tanggal 25 Januari 2023 untuk perhitungan Tunjangan Hari Tua, Beban (Pendapatan), imbalan Pasca kerja untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Tunjangan Hari Tua Pegawai dan Direksi

	2022	2021
Biaya Jasa Kini	2.856.257.746	2.636.183.223
Biaya Bunga	2.331.646.582	2.239.050.305
Hasil yang Diharapkan dari Aset	(699.831.536)	(635.268.909)
Beban (Pendapatan) yang diakui	<u>4.488.072.792</u>	<u>4.239.964.619</u>

Status Rekonsiliasi imbalan pasca kerja untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Rekonsiliasi Pendanaan		
Nilai Kini Kewajiban	(33.515.150.217)	(31.088.621.097)
Nilai Wajar Aset	13.821.972.515	9.331.087.141
Status Pendanaan	(19.693.177.702)	(21.757.533.956)
Kewajiban Transisi yang belum diakui	-	-
Biaya jasa Lalu yang belum diakui	-	-
(Laba)/Rugi Aktuarial yang belum diakui	-	-
Biaya Dibayar Dimuka (Cadangan) yang diakui akhir periode	<u>(19.693.177.702)</u>	<u>(21.757.533.956)</u>

Rekonsiliasi Biaya Dibayar Dimuka (Cadangan) Kewajiban Imbalan Pasca Kerja

	2022	2021
Biaya Dibayar Dimuka (Cadangan) Awal	(21.757.463.956)	(21.969.608.172)
Pembayaran Imbalan	-	-
Beban (Pendapatan)	4.488.072.792	4.239.964.619
Pendapatan Komprehensif Lain	(1.417.432.616)	(2.243.881.236)
Iuran Pemberi Kerja	5.134.996.430	2.208.227.599
Biaya Dibayar Dimuka (Cadangan) akhir periode	<u>(19.693.107.702)</u>	<u>(21.757.463.956)</u>

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

30. IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

b. Program Tunjangan Hari Tua Pegawai dan Direksi (lanjutan)

	2022	2021
Jumlah yang Diakui dalam Laporan Posisi Keuangan		
Liabilitas	(19.693.107.702)	(21.757.463.956)
Aset	-	-
Liabilitas Neto	(19.693.107.702)	(21.757.463.956)

Akumulasi (Laba)/Rugi Aktuarial yang Diakui dalam Pendapatan Komprehensif Lainnya

	2022	2021
Pendapatan Komprehensif Lain Awal	(8.755.117.026)	(6.511.305.790)
(Laba)/Rugi Aktuarial pada Kewajiban	(2.058.347.720)	(2.744.056.361)
(Laba)/Rugi Aktuarial pada Aset	640.915.104	500.245.125
Pendapatan Komprehensif Lain Akhir Periode	(10.172.549.642)	(8.755.117.026)

c. Program Penghargaan Masa Kerja Uang Duka dan Penghargaan Pensiun

Berdasarkan laporan aktuaris Nomor 094-A/PSAK/KKA-AS/II/2023 tanggal 25 Januari 2023 untuk perhitungan penghargaan Masa Kerja Uang Duka dan Penghargaan Pensiun, Beban (Pendapatan) imbalan pasca kerja untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Biaya Jasa Kini	7.398.769.337	5.670.708.272
Biaya Bunga	1.674.910.991	1.700.375.868
Hasil yang Diharapkan dari Aset	-	-
(Laba)/Rugi Aktuarial	-	-
Beban Jasa Lalu	-	-
a. Vested	-	-
b. Non Vested	-	-
c. Transisi	-	-
Beban (Pendapatan) yang diakui	9.073.680.328	7.371.084.140

Status Rekonsiliasi Pendanaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Nilai Kini Kewajiban	(22.861.689.544)	(22.332.146.551)
Nilai Wajar Aset	-	-
Status Pendanaan	(22.861.689.544)	(22.332.146.551)
Kewajiban transisi yang belum diakui	-	-
Biaya Jasa Lalu yang belum diakui	-	-
(Laba)/Rugi Aktuarial yang belum diakui	-	-
BDD (Cadangan) yang diakui akhir periode	(22.861.689.544)	(22.332.146.551)

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

30. IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

c. Program Penghargaan Masa Kerja Uang Duka dan Penghargaan Pensiun (lanjutan)

Rekonsiliasi Biaya Dibayar Dimuka (Cadangan) Kewajiban Imbalan Pasca Kerja:

	2022	2021
Biaya Dibayar Dimuka (Cadangan) Awal	(22.332.146.551)	(23.616.331.499)
Pembayaran Imbalan	2.101.791.942	2.171.411.896
Beban (Pendapatan)	9.073.680.328	7.371.084.140
Pendapatan Komprehensif Lain	(6.442.345.393)	(6.483.857.192)
luran Pemberi Kerja	-	-
Biaya Dibayar Dimuka (Cadangan) Akhir Periode	<u>(22.861.689.544)</u>	<u>(22.332.146.551)</u>
Jumlah yang Diakui dalam Laporan Posisi Keuangan		
Liabilitas	(22.861.689.544)	(22.332.146.551)
Aset	-	-
Liabilitas Neto	<u>(22.861.689.544)</u>	<u>(22.332.146.551)</u>

Akumulasi (Laba)/Rugi Aktuarial yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain

	2022	2021
Pendapatan Komprehensif Lain Awal	(23.183.836.600)	(16.699.979.408)
(Laba)/Rugi Aktuarial pada Kewajiban	(6.442.345.393)	(6.483.857.192)
(Laba)/Rugi Aktuarial pada Aset	-	-
Pendapatan Komprehensif Lain Akhir Periode	<u>(29.626.181.993)</u>	<u>(23.183.836.600)</u>

d. Penghargaan Akhir Masa Jabatan Direksi dan Komisaris

Berdasarkan laporan aktuaris Nomor 047-C/PSAK/DAT/II/2021 tanggal 25 Januari 2021 untuk perhitungan penghargaan Akhir Masa Jabatan Direksi, beban (pendapatan) imbalan pasca kerja untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Biaya Jasa Kini	1.618.587.366	840.558.230
Biaya Bunga	94.166.250	194.743.086
Hasil yang diharapkan dari aset	-	-
(Laba)/Rugi Aktuarial	-	-
Beban Jasa Lalu	-	-
a. Vested	-	-
b. Non Vested	-	-
c. Transisi	-	-
Beban (Pendapatan) yang diakui	<u>1.712.753.616</u>	<u>1.035.301.316</u>

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

30. IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

d. Penghargaan Akhir Masa Jabatan Direksi dan Komisaris (lanjutan)

Status Rekonsiliasi Pendapatan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Nilai Kini Kewajiban	(2.480.852.099)	(2.354.156.257)
Nilai Wajar Aset	-	-
Status Pendanaan	(2.480.852.099)	(2.354.156.257)
Perubahan pada Dampak Batas Aset		
Biaya Dibayar Dimuka (Cadangan) yang diakui akhir periode	(2.480.852.099)	(2.354.156.257)
Rekonsiliasi Biaya Dibayar Dimuka (Cadangan) Kewajiban Imbalan Pasca Kerja		
	2022	2021
Biaya Dibayar Dimuka (Cadangan) awal	(2.354.156.257)	(4.143.469.918)
Pembayaran imbalan	1.602.355.341	8.752.500.000
Beban (pendapatan)	1.712.753.616	1.035.301.316
Pendapatan Komprehensif Lain	16.297.567	5.927.885.023
Iuran Pemberi Kerja	-	-
Biaya Dibayar Dimuka (cadangan) akhir periode	(2.480.852.099)	(2.354.156.257)
Jumlah yang Diakui dalam Laporan Posisi Keuangan		
Liabilitas	2.480.852.099	2.354.156.257
Aset	-	-
Liabilitas Neto	2.480.852.099	2.354.156.257
Akumulasi (Laba)/Rugi Aktuarial yang diakui dalam pendapatan Komprehensif Lain		
	2022	2021
Pendapatan Komprehensif Lain Awal	12.384.266.777	6.456.381.754
(Laba)/Rugi Aktuarial pada Kewajiban	16.297.567	5.927.885.023
(Laba)/Rugi Aktuarial pada Aset	-	-
Perubahan dampak batas aset	-	-
Pendapatan Komprehensif Lain akhir periode	12.400.564.344	12.384.266.777

Asumsi yang digunakan oleh aktuaris untuk menentukan besarnya seluruh kewajiban manfaat karyawan di atas adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Tingkat Mortalitas	GAM tahun 1971	GAM tahun 1971
Tingkat Kecatatan	0.01% per tahun	0.01% per tahun
Tingkat Pengunduran Diri	0.50% per tahun	0.50% per tahun
Tingkat Pensiun Awal	0.10% per tahun	0.10% per tahun
Selisih Usia Peserta dan Suami/istri	5 Tahun	5 Tahun
Rata-rata Kenaikan Gaji pada Masa yang akan Datang	5%	5%
Tingkat Kenaikan Manfaat Pensiun Berkala	Nihil	Nihil
Tingkat Bunga Pengukuran Kewajiban Aktuarial	4,7% - 7,5%	4,7% - 7,5%
Tingkat Bunga Pengukuran Aset Aktuarial	0% - 7,5%	0% - 7,5%
Usia Pensiun	56 Tahun	56 Tahun
Metode yang Digunakan	Projected Unit Credit	Projected Unit Credit

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

31. MANAJEMEN RISIKO

PT. Bank Sulteng menerapkan manajemen risiko yang independent dan sesuai dengan standar yang merujuk pada ketentuan Bank Indonesia serta best practice yang diterapkan di perbankan internasional.

Kerangka pengelolaan risiko Bank mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Kerangka ini tercantum dalam Kebijakan Manajemen Risiko Bank Mandiri (KMRBM) agar sejalan dengan rencana penerapan Basel II Accord secara bertahap di Indonesia. Kerangka pengelolaan risiko tersebut diatur berbagai kebijakan agar manajemen risiko berfungsi sebagai business enabler sehingga bisnis dapat tetap tumbuh dalam koridor prudential principle dengan menerapkan proses manajemen risiko yang ideal (identifikasi - pengukuran - pemantauan- pengendalian risiko) pada semua level organisasi.

Direksi memiliki tanggung jawab secara menyeluruh terhadap pembentukan dan pengawasan terhadap kerangka manajemen risiko Bank. Direksi telah membentuk Komite Aset dan Liabilitas (ALCO), Komite Risiko Kredit dan Operasional yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memonitor kebijakan manajemen risiko Bank di area yang telah ditetapkan. Semua komite Dewan memiliki anggota eksekutif dan non-eksekutif dan melaporkan secara teratur kepada Direksi pada tanggal kegiatan mereka.

Kebijakan manajemen risiko Bank dibuat untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang dihadapi oleh Bank, untuk menetapkan batas risiko dan pengendalian yang tepat, dan memantau risiko dan kepatuhan terhadap batas risiko. Kebijakan manajemen risiko dan sistem direview secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar, produk dan jasa yang ditawarkan.

Bank, melalui pelatihan dan pemeliharaan prosedur operasi standar, bertujuan untuk mengembangkan lingkungan pengendalian yang disiplin dan konstruktif, sehingga semua karyawan memahami peran dan kewajibannya masing-masing.

Komite Audit Bank bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko Bank, dan untuk mengkaji kecukupan kerangka kerja manajemen risiko dalam kaitannya dengan risiko yang dihadapi oleh Bank. Komite Audit Bank dibantu oleh fungsi-fungsi internal Audit. Internal Audit melakukan review terhadap prosedur dan pengendalian manajemen risiko secara regular dan ad-hoc, hasilnya dilaporkan kepada Komite Audit Bank.

Seluruh risiko dilaporkan Bank kepada Bank Indonesia melalui penyusunan laporan Profil Risiko secara triwulan dan laporan Tingkat Kesehatan Bank secara semesteran untuk menggambarkan seluruh risiko yang melekat dalam kegiatan bisnis Bank.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

31. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Profil Risiko Bank

Penilaian Profil Risiko, yang mencakup penilaian terhadap Risiko Inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan manajemen risiko yang mencerminkan sistem pengendalian Risiko (risk control system), baik untuk Bank secara individual maupun untuk Bank secara konsolidasi. Penilaian tersebut dilakukan terhadap 8 (delapan) Risiko yaitu : Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi.

Ringkasan sesuai matriks profil risiko, yaitu sebagai berikut:

Profil Risiko	Desember 2022			Desember 2021		
	Peringkat Risiko Inherent	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko	Peringkat Risiko Inherent	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Kredit	Moderate	Fair	3	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Pasar	Low to Moderate	Satisfactory	2	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Operasional	Moderate	Fair	3	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Likuiditas	Low to Moderate	Satisfactory	2	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Hukum	Low to Moderate	Satisfactory	2	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Reputasi	Low to Moderate	Satisfactory	2	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Strategik	Low to Moderate	Satisfactory	2	Moderate	Fair	3
Risiko Kepatuhan	Moderate	Satisfactory	3	Low to Moderate	Satisfactory	2
Peringkat Komposit	Low to Moderate	Satisfactory	2	Low to Moderate	Satisfactory	2

Dengan melihat risiko inherent berada pada posisi Low to Moderate dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada posisi Satisfactory, maka peringkat Profil Risiko Per Desember 2022 adalah peringkat 2 (dua).

b. Risiko Kredit

Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit adalah untuk memastikan bahwa aktivitas penyediaan dana Bank tidak terekspos pada Risiko Kredit yang dapat menimbulkan kerugian pada Bank.

Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko tersebut tergolong cukup signifikan. Dengan melihat Risiko Inherent yang berada pada posisi Moderate, serta Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang berada pada posisi Fair, dapat disimpulkan Peringkat Risiko untuk Risiko Kredit mendapatkan nilai 3 (Tiga).

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

31. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko Kredit

Peringkat Risiko Kredit mendapatkan nilai 3 (tiga) disebabkan oleh:

- 1) Posisi Outstanding NPL Per 31 Desember 2022 sebesar Rp193.558.592.505,- dengan rasio NPL 3,09% dibandingkan dengan NPL Per 30 Juni 2022 sebesar Rp133.427.075.504,- rasio NPL 2,30% hal ini terjadi kenaikan Outstanding NPL sebesar Rp60.131.517.001,- dengan kenaikan rasio NPL sebesar 0,79%.
- 2) Bertambahnya Kredit Bermasalah selama periode Semester II Tahun 2022 antara lain; debitur sakit 4 debitur, kasus fraud 147 debitur, gaji di bank lain 19 debitur, gaji kurang 2 debitur, gaji pensiun berkurang 2 debitur, indisipliner 10 debitur, kasus hukum 1 debitur, meninggal 32 debitur, menunggu gaji pensiun 1 debitur, menunggu hasil panen 2 debitur, menunggu pembayaran dana desa 4 debitur, menunggu pembayaran sertifikasi 2 debitur, menunggu pembayaran tagihan 2 debitur, menunggu pembayaran TPP 13 debitur, omzet menurun 57 debitur, PAW 3 debitur, penghasilan berkurang 1 debitur, pensiun dini 2 debitur, PHK 26 debitur, pindah tugas 5 debitur, putus kontrak 3 debitur, termyn tidak terbayar 18 debitur, usaha tutup 5 debitur, TPP tidak dibayar 2 debitur.

Sehubungan dengan bertambahnya kredit bermasalah selama periode semester II Tahun 2022 dampak yang terjadi adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pengawasan aktif oleh Komisaris dan Direksi sudah dilakukan dengan cukup baik.
- 2) Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi tercermin dari tanggung jawab atas efektifitas penerapan manajemen risiko di Bank Sulteng. Kedepannya agar pengawasan secara aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi untuk terus ditingkatkan dengan memberikan arahan dalam meningkatkan manajemen risiko melalui mekanisme rapat yang terus menerus atau dalam bentuk rekomendasi atau evaluasi penerapan manajemen risiko.
- 3) Perumusan tingkat risiko yang diambil cukup memadai (risk appetite, tolerance, limit), namun pelaksanaannya belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dan belum dilakukan review secara berkala. Hal ini dapat berjalan dengan maksimal apabila seluruh komponen yang terlibat dapat bersinergi dengan baik serta saling mendukung.
- 4) Penetapan tingkat risiko dan toleransi risiko juga harus sejalan dengan Rencana Bisnis Bank sehingga lebih terarah serta dapat menjadi acuan dan bahan evaluasi bagi risk taking unit untuk mengambil langkah strategis yang tepat kedepannya didalam merealisasikan ekspansi kredit, menekan peningkatan Non Performing Loan (NPL), sehingga biaya yang timbul dalam pembentukan CKPN bisa diminimalisasi dan pencapaian profit dapat terealisasi.

Berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Jaminan umumnya diadakan selama penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

31. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Adapun Maksimum Eksposur Risiko Kredit adalah sebagai berikut (dalam jutaan rupiah):

	2022	2021
Bank Indonesia	911.670	349.461
Giro pada Bank Lain	363.879	5.120
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	895.396	3.146.222
Efek-efek	3.249.088	1.543.550
Kredit yang Diberikan	6.267.451	5.625.590
Jumlah - Bruto	11.687.485	10.669.942
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(108.375)	(96.230)
Jumlah - Bersih	11.579.110	10.573.712

Eksposur risiko kredit terhadap rekening administratif pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Garansi yang Diterbitkan	14.041.927.727	29.588.408.424
Fasilitas Kredit Kepada Debitur yang Belum Digunakan	59.644.227.145	56.414.169.653
Jumlah - Bersih	73.686.154.872	86.002.578.077

Tabel di atas menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit bagi Bank pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya. Untuk aset pada laporan posisi keuangan, eksposur di atas ditentukan berdasarkan nilai tercatat bersih seperti yang diungkapkan pada laporan keuangan.

Ikhtisar kredit yang diberikan adalah sebagai berikut:

	2022	
	Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai
Pertanian	167.174.439.228	4.433.426.097
Pertambangan	267.827.652.421	3.238.676.907
Perindustrian	6.218.834.440	1.971.140.972
Perdagangan/Restoran & Hotel	113.997.710.474	45.380.718.165
Konstruksi	155.162.047.796	46.694.618.523
Pengangkutan	-	252.902.125
Jasa dunia usaha	47.293.041.010	13.812.007.633
Lain-Lain	5.316.219.041.947	77.775.102.083
Jumlah	6.073.892.767.317	193.558.592.505
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(31.896.122.834)	(76.478.793.330)
Jumlah - Bersih	6.041.996.644.483	117.079.799.175

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

31. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko Kredit (lanjutan)

	2021	
	Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai
Pertanian	19.371.044.698	3.921.060.750
Pertambangan	100.549.654.491	576.606.217
Perindustrian	3.259.114.033	1.317.385.696
Perdagangan/Restoran & Hotel	82.135.451.302	15.083.388.591
Konstruksi	311.733.598.321	13.861.621.559
Pengangkutan	925.277.755	243.824.897
Jasa dunia usaha	309.591.935.986	8.259.259.176
Lain-Lain	4.722.990.866.477	31.769.619.876
Jumlah	5.550.556.943.063	75.032.766.762
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(56.564.627.443)	(39.665.355.155)
Jumlah - Bersih	5.493.992.315.619	35.367.411.607

Bank mendorong optimalisasi portofolio kredit dimana perluasan/diversifikasi kredit didasarkan pada rencana strategis Bank, kondisi ekonomi saat ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan kredit, standar dan pelaksanaan serta pemantauan dan pengadministrasian portofolio kredit ditetapkan oleh pejabat bank. Kebijakan ini disetujui oleh Dewan Komisaris dan secara berkala diperbarui untuk memasukkan perubahan pasar dan peraturan perbankan yang baru.

Risiko inherent untuk risiko kredit berada pada posisi Moderate. Berikut ini adalah rasio non-Performing Loan (NPL) Gross dan Rasio Non-Performing Loan (NPL) Netto Bank pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

	2022	2021
Rasio NPL Gross	3,09%	1,33%
Rasio NPL Netto	1,87%	0,63%
Rasio KAP	1,17%	0,57%

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

31. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko Kredit (lanjutan)

Rasio Kualitas Aset Produktif (KAP) merupakan rasio antara aset yang diklasifikasikan tidak produktif (AYDTP) dibandingkan dengan total aset produktif (AP). Aset yang diklasifikasikan tidak produktif merupakan rata-rata tertimbang aset berdasarkan kolektibilitas.

Risiko NPL Gross merupakan rasio antara baki debit pinjaman yang digolongkan non-performing loan (kategori kurang lancar, diragukan dan macet) dibandingkan dengan total baki debit pinjaman. Rasio NPL Netto merupakan rasio antara nilai bersih pinjaman yang digolongkan non-performing loan (kategori kurang lancar, diragukan dan macet) dibandingkan dengan baki debit pinjaman. Nilai bersih merupakan baki debit dikurangi saldo penyisihan penghapusan pinjaman.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit berada pada posisi Fair. Kebijakan yang diambil oleh Bank Sulteng dalam Penerapan Manajemen Risiko Kredit adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam menjalankan bisnis bank khususnya berkenaan dengan administrasi kredit telah dilakukan secara efisien dan efektif mencakup aspek perjanjian kredit, pengikatan agunan sampai dengan pengarsipan kredit baik file kredit maupun agunan kredit.
- 2) Seluruh proposal kredit telah mulai dilakukan perbaikan atas dokumen baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif serta bukti-bukti lainnya yang telah disatukan dalam arsip (file).
- 3) Bank telah melakukan pengarsipan dari setiap debitur dalam file kredit termasuk *pengupadetan* data dokumen data dokumen namun hal tersebut belum dilakukan secara periodic.
- 4) Dari strategi dan kebijakan prosedur yang dikeluarkan telah diperuntukkan bagi kepentingan jangka panjang dan jika strategi/kebijakan tersebut tidak sesuai dengan keadaan, maka secara kontinyu akan terus dilakukan penyesuaian.
- 5) Seluruh kebijakan dan prosedur yang rencana akan diterapkan, sebelumnya telah dikaji dan mendapat rekomendasi dari Komite Manajemen Risiko termasuk Kepatuhan.
- 6) Bank secara rutin telah melakukan monitoring/pemantauan terhadap seluruh portofolio kredit yang ada melalui laporan watchlist terhadap kondisi dan kualitas kredit masing-masing cabang secara bulanan, namun belum spesifik dilakukan khusus untuk debitur-debitur dengan exposure tertentu yang berpotensi bisa terjadi penurunan kualitas kredit. Kedepannya akan dilakukan review secara kontinyu perbulan atau per 3 bulanan melalui Post Mortem Review oleh Divisi Kredit minimal kepada eksposire kredit yang besar.
- 7) Bank telah menerapkan Credit Scoring melalui Aplikasi Loan Origination System (LOS).

c. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko bahwa perubahan harga pasar seperti suku bunga, akan memengaruhi pendapatan atau nilai dari instrumen keuangan.

Risiko tingkat bunga bank merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan bunga, mengingat tingkat suku bunga tersebut sesuai dengan strategi bisnis Bank. Kegiatan manajemen dalam memonitoring aset dan liabilitas bank dilakukan terhadap setiap perubahan tingkat suku bunga. Adapun pengelolaan risiko suku bunga disertai dengan pemantauan sensitivitas aset keuangan dan liabilitas bank untuk meningkatkan atau menurunkan tingkat suku bunga pasar.

Risiko nilai tukar adalah risiko kerugian akibat pergerakan yang berlawanan dari nilai tukar pada saat Bank memiliki posisi terbuka. Bank tidak memiliki saldo dan transaksi dalam mata uang asing. Dengan demikian, Bank tidak menghadapi risiko nilai tukar.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

31. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

c. Risiko Pasar (lanjutan)

Dengan melihat Risiko Inherent yang berada pada posisi Low to Moderate, serta Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang berada pada posisi Satisfactory, dapat disimpulkan Peringkat Risiko untuk Risiko Pasar adalah 2 (dua). Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh Bank, kemungkinan kerugian yang akan dihadapi oleh Bank dari risiko pasar cukup tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko pasar berada pada posisi Satisfactory. Kebijakan yang diambil oleh Bank Sulteng dalam Penerapan Manajemen Risiko Pasar adalah sebagai berikut:

- 1) Bank telah memperhatikan penyusunan dan penetapan toleransi risiko serta besarnya risiko yang akan diambil dengan mempertimbangkan strategi dan tujuan bisnis bank yang tertuang dalam RBB. Namun belum dilakukan secara berkala;
- 2) Direksi telah memberikan arahan kepada setiap unit kerja dalam Menyusun kebijakan Manajemen risiko khususnya penyusunan limit risiko yang akan diambil dan toleransi risiko;
- 3) Pengawasan aktif Dewan Komisaris cukup memadai.
- 4) Komisaris telah mendapatkan informasi mengenai suku bunga yang diinformasikan secara berkala.

Tabel di bawah ini merupakan besaran tingkat bunga per tahun untuk aset dan liabilitas yang signifikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

	2022	2021
ASET		
Giro pada bank lain	1%	1%
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain		
Call Money Fasbi	4,75%	2,75%
Deposito Berjangka	5,33%	2,84%
Deposito on Call	4.97% - 6.00%	2,86% - 3,51%
Interbank Call Money	5,60%	3,30%
Efek-efek		
Sertifikat Bank Indonesia	-	-
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	-	-
NCD	7,20%	4,25% - 7,20%
Surat Berharga Negara	-	-
Reverse Repo	4,54% - 8,38%	3,01% - 7,55%
Obligasi	6,35% - 8,00%	6,95% - 12,25%
Medium Term Note	-	-
Kredit yang diberikan	4,5% - 20%	5% - 20%
LIABILITAS		
Simpanan dan Nasabah		
Giro	0,35% - 2,40%	0,35% - 2,40%
Tabungan	0,00% - 2,50%	0,00% - 2,50%
Deposito	0.00% - 6,80%	1,00% - 7,00%
Simpanan dari Bank Lain		
Giro	-	-
Call Money	5.70% - 6.10%	2,95% - 3,52%

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

31. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

d. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko di mana Bank tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajibannya (membayar kepada kreditur atau melunasi hutang-hutangnya pada saat jatuh tempo). Risiko likuiditas dapat diperkecil dengan suatu perencanaan cash flow dan pengelolaan kelebihan dana yang tepat dengan tetap mengantisipasi kebutuhan dan kewajiban di masa yang akan datang. Pengelolaan likuiditas dan risiko pendanaannya diawasi oleh komite ALCO. Kebijakan risiko likuiditas merupakan tanggung jawab manajemen dan strategis yang harus diambil untuk menjamin likuiditas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan Bank sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ukuran utama yang digunakan oleh Bank untuk mengelola risiko likuiditas adalah rasio aset lancar bersih terhadap simpanan nasabah. Rasio aktiva lancar bersih dianggap sebagai uang tunai dan kas pada aktiva lancar dikurangi dengan simpanan dari bank (Giro pada Bank Lain).

Untuk memantau tingkat risiko likuiditas Bank melakukan analisis jatuh tempo aset dan kewajiban secara periodik.

Tabel berikut ini menggambarkan analisis jatuh tempo aset dan liabilitas Bank dihitung berdasarkan sisa periode pada akhir tahun sampai ada jatuh tempo kontrak.

	2022					
	Saldo	<1 Bulan	1-3 Bulan	3-6 Bulan	6-12 Bulan	>12 Bulan
ASET						
Kas	152.061	152.061	-	-	-	-
Giro pada BI	911.670	911.670	-	-	-	-
Antar Bank Aktiva	363.879	363.879	-	-	-	-
Efek-efek	3.249.088	-	2.419.659	-	19.502	809.927
Kredit yg diberikan	6.267.451	5.407.916	37.245	57.903	66.511	697.877
Lain-lain						
Jumlah	10.944.149	6.835.525	2.456.904	57.903	86.013	1.507.804
LIABILITAS						
Simpanan	8.145.074	5.090.792	1.829.909	35.400	1.188.973	-
Antar Bank Pasiva	850.000	850.000	-	-	-	-
Pinjaman yg Diterima	75.013	75.013	-	-	-	-
Lain-lain	-					
Jumlah	9.070.088	6.015.805	1.829.909	35.400	1.188.973	-
Perbedaan JT	1.874.061	819.720	626.995	22.503	(1.102.961)	1.507.804

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

31. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

d. Risiko Likuiditas (lanjutan)

	2021					
	Saldo	<1 Bulan	1-3 Bulan	3-6 Bulan	6-12 Bulan	>12 Bulan
ASET						
Kas	223.579	223.579	-	-	-	-
Giro pada BI	349.461	349.461	-	-	-	-
Antar Bank Aktiva	3.146.222	3.146.222	-	-	-	-
Efek-efek	1.543.550	-	-	-	1.003.223	540.327
Kredit yg diberikan	5.625.590	89.984	69.047	23.369	179.185	5.264.005
Lain-lain	-	-	-	-	-	-
Jumlah	10.888.402	3.809.246	69.047	23.369	1.182.408	5.804.331
LIABILITAS						
Simpanan	7.979.533	4.672.539	1.588.269	357.420	1.361.305	-
Antar Bank Pasiva	825.000	825.000	-	-	-	-
Pinjaman yg Diterima	67.999	-	-	-	-	67.999
Lain-lain	95.095	95.095	-	-	-	-
Jumlah	8.967.626	5.592.633	1.588.269	357.420	1.361.305	67.999
Perbedaan JT	1.920.776	(1.783.387)	(1.519.222)	(334.051)	(178.897)	5.736.333

e. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya masalah eksternal yang memengaruhi operasional bank. Tujuan Bank adalah untuk mengelola risiko operasional sehingga dapat menghindari kerugian keuangan dan reputasi Bank.

Adapun tanggung jawab untuk meminimalisir terjadinya risiko operasional yang dapat memengaruhi kegiatan Bank, antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyesuaian dan pemisahan tugas serta otorisasi transaksi bank
- 2) Pemantauan operasional bank.
- 3) Dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Mengontrol seluruh dokumentasi dan prosedur bank
- 5) Jika terjadi kesalahan ataupun kegagalan dalam operasional bank akan dilakukan pelaporan dan pengusulan tindakan perbaikan
- 6) Melakukan pelatihan dan pengembangan pegawai terhadap risiko operasional
- 7) Memitigasi risiko yang mungkin timbul

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

31. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

e. Risiko Operasional (lanjutan)

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional berada pada posisi Fair, pengelolaan Risiko Operasional menjadi perhatian oleh manajemen, dimana dalam pengelolaannya melalui beberapa cara antara lain:

- 1) Pengisian profil risiko melalui Aplikasi Tingkat Kesehatan Bank secara rutin setiap bulan untuk mengidentifikasi early warning system sehingga Bank segera mengambil Langkah-langkah mitigasi yang diperlukan;
- 2) Penerapan Standar Operasional Prosedur yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk menghindari risiko;
- 3) Saat ini Bank sudah memiliki sistem informasi manajemen risiko (TKB) dan Profil Risiko Cabang (PRC) yang dapat memastikan terukurnya eksposur risiko baik eksposur risiko secara keseluruhan/ komposit maupun eksposur per jenis risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank, maupun eksposur risiko per jenis aktivitas fungsional Bank namun belum secara akurat, informatif, dan tepat waktu.

f. Risiko Hukum

Risiko inherent yang berada pada posisi Low To Moderate serta Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang berada pada posisi Satisfactory, dapat disimpulkan Peringkat Risiko untuk Risiko Hukum adalah 2 (Dua), hal ini disebabkan adanya perkembangan atas kasus hukum yang dihadapi Bank Sulteng, dimana kasus tersebut bank dinyatakan kalah oleh Mahkamah Agung dan terdapat pula beberapa kasus hukum lainnya yang tengah dihadapi oleh Bank.

1)

Laporan dugaan tindak pidana perbankan berdasarkan surat perintah penyelidikan tanggal 23 juni 2022 terkait adanya dugaan tindak pada perbankan dengan cara pegawai Bank BPD Sulteng KC Parigi tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan pencairan dana dinas kesehatan kab. parimo tahun anggaran 2020. Tuntutan permasalahan ini merupakan hasil pengembangan pemeriksaan tindak pidana korupsi oleh polres parimo terhadap bendahara Dinas Kesehatan Parigi Moutong tahun anggaran 2020. perkembangan kasus dalam penyelidikan polda sulteng telah memanggil pegawai cabang parigi yang memproses pencairan uang Dinas Kesehatan parimo pada tanggal 31 Desember 2020. Proses pemeriksaan saat ini masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak penyidik polda sulteng, dan belum ditemukan adanya proses pencairan dana dinas kesehatan tahun anggaran 2020 yang menyalahi prosedur. Kasus ini Masih dalam tahap penyelidikan dengan memanggil saksi -saksi pegawai cabang parigi.

- 2) Pelaporan dugaan tindak pidana Perbankan berdasarkan laporan polisi nomor : LP/B/249/VIII/SULTENG/SPKT tanggal 30 agustus 2022 kepada sdr Rio Kartono (Mantan Pimpinan Seksi admin Kredit cabang Kolonodale). Tuntutan permasalahan ini merupakan tindakan fraud yang merugikan PT. Bank Sulteng, sehingga atas perintah Direksi dilakukan pelaporan tindak perbankan di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. Perkembangan kasus penyelidikan Polda Sulteng telah melakukan permintaan keterangan baik dari pihak Auditor maupun Para Pegawai Cabang Kolonodale, sehingga berdasarkan gelar perkara telah menetapkan Sdr. Rio kartono sebagai Tersangka dan dilakukan penahanan. Kasus ini telah dilimpahkan (Tahap I) dari Kepolisian Daerah Sulteng ke pihak Kejaksaan Tinggi untuk mendapatkan petunjuk dari jaksa Penuntut Umum.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

31. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

f. Risiko Hukum (lanjutan)

- 3) Laporan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan berdasarkan Laporan Pengaduan nomor: STTL-ADUAN/43/II/2022/SPKT B/RESOR PALU tanggal 01 februari 2022. Tuntutan Permasalahan ini merupakan hasil pelaporan sdr. Listiyani Wahyuni ST, atas dugaan Penipuan dan atau penggelapan pada bulan Desember 2020, yang mana berhubungan dengan pemberian kredit kepada CV. Bintang Timur di kantor PT. Bank Suteng cabang Palu Barat. Perkembangan kasus permintaan keterangan dalam bentuk wawancara kepada Pegawai PT. Bank Sulteng Cabang Palu Barat yang memproses Kredit CV. Bintang Timur, dari proses penyelidikan tersebut diketahui Direktur CV. Bintang Timur merasa dirugikan atas Proses pendebitan pembayaran kewajiban yang tidak bersumber dari pekerjaan yang telah dibiayai dan terdapat oknum yang berkewajiban melakukan pembayaran kredit tersebut dan wajib mengganti uang yang telah terdebit dalam rangka pembayaran kewajiban. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan dan meminta keterangan dari saksi-saksi yang ada hubungannya dengan kredit CV. Bintang Timur.
- 4) Laporan Dugaan tindak Pidana Pemalsuan berdasarkan Laporan Pengaduan nomor : B/2154/XII/2022/Satreskrim Kepolisian Resor Kota Palu tanggal 23 Desember 2022. Tuntutan permasalahan ini merupakan hasil pelaporan sdr. ferawati, atas dugaan Pemalsuan Surat Kuasa dalam rangka melakukan penarikan dana stimulan di cabang Tawaeli, adapun penarikan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, penarikan pertama dilakukan oleh pelapor Ferawati sebesar Rp.20.000.000 dan penarikan kedua dilakukan oleh Erfin (penerima kuasa) sebesar Rp.30.000.000. Penyidik Polresta Palu telah melakukan permintaan keterangan dalam bentuk wawancara kepada Pegawai PT. Bank Sulteng Cabang Palu Barat yang memproses Penarikan uang menggunakan surat kuasa dan dari hasil penjelasan Head Teller bahwa surat kuasa yang digunakan oleh saudari Erfin untuk menarik uang sebesar Rp.30.000.000 telah diverifikasi oleh pihak BPBD dan telah mendapat Rekomendasi untuk dilakukan pencairan dana. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan dan meminta keterangan dari saksi-saksi yang ada hubungannya pemalsuan surat Kuasa.

g. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif terhadap Bank.

Risiko Inherent yang berada pada posisi Low To Moderate, serta Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang berada pada posisi Satisfactory, dapat disimpulkan Peringkat Risiko untuk Risiko Reputasi adalah 2 (Dua). Bank terus berupaya untuk meningkatkan kinerja Bank guna memenuhi kebutuhan nasabah dan mempertahankan pangsa pasar Bank.

Risiko inheren untuk Risiko Reputasi berada pada posisi Low To Moderate, dengan beberapa parameter penilaian sebagai berikut:

- 1) Tidak adanya pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh Bank
- 2) Tidak terdapat pemberitaan negative pada periode ini.
- 3) Bank juga telah membentuk satuan khusus untuk menangani keluhan nasabah
- 4) Bank juga terus berusaha meningkatkan pelayanan Bank kepada Nasabah

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

31. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

g. Risiko Reputasi (lanjutan)

Pengendalian risiko yang berdampak pada risiko reputasi telah dilakukan oleh dewan komisaris dan direksi dengan mengevaluasi setiap kejadian yang berdampak pada reputasi bank. Pengawasan terhadap risiko reputasi dilakukan oleh dewan komisaris dan direksi dengan memberikan informasi yang komprehensif kepada nasabah dan stakeholder sehingga dapat memberikan pemahaman atas setiap permasalahan ataupun kejadian yang dialami oleh bank melalui Divisi Corsec.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi kebijakan yang diambil oleh Bank Sulteng dalam penerapan Manajemen Risiko Reputasi adalah sebagai berikut:

- 1) Bank telah memperhitungkan semua aktivitas dan dampak risiko pada setiap kegiatan operasional masing-masing divisi dengan memberlakukan kebijakan dan prosedur untuk dilaksanakan dalam proses pengambilan keputusan, namun dalam proses identifikasi setiap risiko bank belum melakukan pendekatan dengan menggunakan alat ukur yang memadai.
- 2) Proses pengambilan keputusan oleh direksi telah mempertimbangkan kejadian masa lalu yang berdampak atas risiko reputasi untuk melahirkan proses lengkap, akurat dan tepat waktu.
- 3) Dalam pengambilan keputusan penggunaan sistem informasi oleh bank dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko telah melalui proses seleksi secara independen melalui perjanjian kerjasama. Untuk mendukung pengambilan proses risiko yang akurat serta penggunaan sistem informasi tersebut telah didukung dengan sistem dan teknologi terbaru yang dapat diakses dengan mudah dan akurat. Namun Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Manajemen Risiko saat ini masih perlu untuk diberikan pendidikan dan pelatihan terkait tugas dan tanggung jawabnya guna mendukung efektivitas proses manajemen risiko.

h. Risiko Strategik

Risiko Inherent yang berada pada posisi Low To Moderate, serta Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang berada pada posisi Satisfactory, Pencapaian kinerja keuangan Bank pada akhir periode ini mengalami perbaikan yang baik, target-target yang ditetapkan oleh Bank hampir semuanya terealisasi. dapat disimpulkan Peringkat Risiko untuk Risiko Strategik adalah 2 (Dua).

Risiko Inherent untuk Risiko Strategik berada pada posisi Low To Moderate dan untuk mencapai Visi Misi Bank Sulteng dimana dilakukan strategi pengembangan bisnis, diantaranya adalah penguatan funding beserta perbaikan komposisinya. Selain itu, Bank telah mengeluarkan produk-produk baru guna menghimpun DPK, namun belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang telah ditargetkan.

Perwujudan Sistem Pengendalian Risiko untuk Risiko Strategik Bank harus memastikan sistem informasi manajemen yang dimiliki telah memadai untuk mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategik namun perlu dilakukan review berkala agar sejalan dengan regulasi dan perkembangan bisnis perbankan.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

31. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

i. Risiko Kepatuhan

Risiko Inherent yang berada pada posisi Moderate, serta Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang berada pada posisi Satisfactory dapat disimpulkan Peringkat Risiko untuk Risiko Kepatuhan adalah 3 (Tiga). Hal tersebut terjadi akibat belum terciptanya budaya-budaya kepatuhan dan fungsi kepatuhan yang baik pada Bank, tercermin dari terdapat Fraud pada salah satu kantor Cabang (Cabang Buol dan Kantor Cabang Pembantu Labean) masih terdapat pula denda atas ketidakpatuhan Bank terhadap aturan yang berlaku dan masih terdapat beberapa komitmen Bank kepada OJK yang belum dipenuhi sesuai dengan komitmen Bank.

Fungsi kepatuhan yang kurang maksimal diterapkan di lingkungan intern Bank Sulteng sehingga kepatuhan bank terhadap Otoritas Jasa Keuangan masih kurang, hal ini terlihat pada komitmen Bank yang belum terpenuhi atas hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan masih terdapat denda-denda atas ketidakpatuhan Bank terhadap peraturan yang berlaku.

Tata Kelola yang Bank laksanakan untuk memitigasi Risiko Kepatuhan sebagai berikut:

- 1) Pengawasan Aktif Komisaris dan Direksi harus lebih ditingkatkan.
- 2) Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan telah mensosialisasikan budaya risiko dan kepatuhan kepada seluruh pegawai.
- 3) Bank telah memiliki pedoman kebijakan tentang Kepatuhan, namun belum menguraikan tentang pertimbangan toleransi risiko dan dampak terhadap permodalan, kedepannya akan dilakukan revisi BPP tentang penerapan fungsi kepatuhan.
- 4) Bank telah memiliki ukuran tentang kompetensi pegawai karena sumber daya manusia khususnya pada aktivitas fungsional treasuri dan investasi belum sepenuhnya memiliki sertifikasi treasuri, namun kedepannya setiap petugas yang menangani treasuri mulai dari jenjang Direksi sampai dengan staff harus mengikuti sertifikasi treasuri.

32. MANAJEMEN PERMODALAN

Tujuan manajemen permodalan Bank adalah untuk mempertahankan posisi modal yang kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan mempertahankan investor, deposan, pelanggan dan pasar dalam pengelolaan permodalan Bank mempertimbangkan faktor-faktor seperti: pengembalian modal yang optimal pada pemegang saham, menjaga keseimbangan antara keuntungan yang lebih tinggi dengan gearing ratio serta kesamaan yang diberikan oleh posisi modal yang sehat.

Pada tanggal 31 desember 2022 dan 2021, Bank telah memenuhi semua syarat permodalan yang diwajibkan.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

32. MANAJEMEN PERMODALAN (lanjutan)

Rasio Penyediaan Modal Minimum

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (Capital Adequacy Ratio [CAR]) adalah rasio modal terhadap aset tertimbang menurut risiko (Risk - Weighted Assets (RWA)). Berdasarkan peraturan Bank Indonesia, jumlah modal untuk risiko kredit terdiri dari modal Inti (Tier I) dan Modal Pelengkap (Tier II) dikurangi penyertaan pada Entitas Anak. Rasio kecukupan Modal pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut (dalam jutaan Rupiah):

	2022	2021
Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Kredit	3.999.960	3.439.687
Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Operasional	1.013.876	895.436
Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Pasar	-	-
Total Modal	1.299.155	1.241.982
Rasio Kewajiban Penyertaan Modal Minimum (KPMM)	26,12%	28,65%
Rasio Minimum menurut POJK 11/POJK.03/2016	9,30%	10,00%

Kegiatan alokasi modal didorong oleh optimalisasi jumlah modal yang jumlahnya tergantung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memaksimalkan laba atas risiko yang disesuaikan dengan modal dasar yang digunakan dalam menentukan bagaimana modal dialokasikan oleh Bank pada operasional atau kegiatan tertentu. Kebijakan Bank yang berhubungan dengan pengelolaan modal dan alokasi dana diriview secara berkala oleh Direksi.

Sejak tahun 2007, Bank diwajibkan untuk memenuhi kerangka kerja Basel II dalam hal ini permodalan Bank dengan mengikuti road map implementasi Basel II di Indonesia yang dipimpin oleh Bank Indonesia.

Penerapan Bank atas risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional dalam permodalan adalah sebagai berikut:

a. Risiko kredit

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No 7/10/DPNP tanggal 31 Maret 2005, Bank menggunakan pendekatan Basel I untuk mengelola risiko kredit.

Bank menerapkan pendekatan standar untuk mengelola risiko kredit mulai 1 Januari 2012 sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011.

b. Risiko Operasional

Untuk pengelolaan risiko operasional Bank menerapkan pendekatan indikator dasar sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No 11/3/DPNP tanggal 27 Januari 2009. Berdasarkan Surat Edaran tersebut, beban modal untuk risiko operasional sebesar 5%, 10% dan 15% dari rata-rata pendapatan kotor selama tiga tahun terakhir.

Bank mengklasifikasikan modal dalam 2 (dua) tingkatan:

- 1) Modal Tier 1 terdiri dari modal saham biasa, agio saham, saldo laba, selisih penjabaran laporan keuangan, dan kepentingan non pengendali setelah dikurangi goodwill dan aset tak berwujud dan penyesuaian lainnya sehubungan dengan item yang termasuk dalam modal tetapi diperlakukan secara berbeda sesuai kepentingan.
- 2) Modal Tier 2 terdiri dari pinjaman subordinasi yang memenuhi syarat dan cadangan umum (maksimum 1,25% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko [ATMR]).

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)


32. MANAJEMEN PERMODALAN (lanjutan)

Bank tidak memiliki modal tambahan lainnya yang memenuhi kriteria modal tier 3 dalam Peraturan Bank Indonesia yang berlaku.

Berbagai Batasan diterapkan untuk unsur-unsur dari modal dasar. Pengaruh pajak tangguhan telah dikecualikan dalam menentukan jumlah laba ditahan untuk modal tier 1, hanya 50 persen dari keuntungan tahun berjalan sebelum pajak tangguhan yang termasuk dalam modal tier 1 dan kualifikasi modal tier 2 tidak dapat melebihi modal tier 1. Ada juga pembatasan pada jumlah penurunan cadangan penurunan nilai - kolektif yang dapat dimasukkan sebagai bagian dari modal tier 2.

33. TANGGAL PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Direksi bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 yang disusun dan diotorisasi pada tanggal 20 Februari 2023.



www.banksulteng.co.id